

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan, akuntabilitas yang diterapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tapi juga akuntabilitas kepada segenap *stakeholders* (pemangku kepentingan). Berkaitan dengan hal tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai menyusun Laporan Kinerja (Lakin) sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan salah satu unit di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), yang mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Lakin Pusdiklat Bea dan Cukai Triwulan IV Tahun 2021 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Gambaran umum tentang pencapaian kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai sampai dengan berakhirnya Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran Kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output Pusdiklat Bea dan Cukai sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT		PAGU	REALISASI	CAPAIAN	SALDO
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
(1)		(2)	(3)	(4) = (3/2) x 100%	(5) = (2) - (3)
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen				
4679.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	40,000	-	0,00%	40,000
4679.EAC	Layanan Umum	4,380,862,000	3.350.170.275	77,50%	972.691.725
4679.EAD	Layanan Sarana Internal	1,677,582,000	939.608.811	57,29%	700.473.189
4679.EAE	Layanan Prasarana Internal	8,868,418,000	3.996.987.187	44,59%	4.996.930.813
4679.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2,000,000	-	0,00%	2,000,000
4683.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	144,512,000	36.990,000	25,60%	107.522.000
4683.EAF	Layanan SDM	8,595,403,000	8.020.840.582	93,32%	535.761.602
JUMLAH		23,668,817,000	16.344.596.855	69,06%	7.285.419.329

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target dan Capaian IKU Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2021

No	Uraian IKU	Target 2021	(Januari - Desember)			
			Target s.d. Q4	Realisasi		Capaian
				Data Mentah	Realisasi	
1.	1a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	80%	80%	-	82,74%	103,42%
2.	2a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	84%	84%	52/52	100%	119,05%
3.	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,41 (skala 5)	4,41	-	4,63	104,99%
4.	4a-CP Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%	100%		100%	100%
5.	5a-CP Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%	70%	-	98,04%	140,06%
6.	5b-N Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja kementerian keuangan	0,7177%	0,7177%		0,8048%	112,13%
7.	6a-CP Persentase lulusan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	93%		94,78%	101,91%
8.	6b-N Indeks Persepsi Peserta Pelatihan	4,33 (skala 5)	4,33 (skala 5)	-	4,75	109,70%
9.	7a-CP Tingkat pemanfaatan <i>knowledge</i> pada platform KLC	100%	100%	-	118%	118%
10..	8a- CP Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi	80%	80%	-	100%	125%
11.	9a-CP Indeks pemenuhan standar Kualitas Pembelajaran	5 (skala 5)	5	-	5	100%
12.	10a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	100%	100%	-	92,86%	92,86%
13.	10b-CP Indeks Integritas	90,10	90,10		91,06	101,07%
14.	10c-N Persentase pelaksanaan kajian, <i>knowledge capture</i> dan aktualisasi pembelajaran	100%	100%	-	109,33%	109,33%
15.	10d-N Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	85%	85%	-	99,16%	116,67%
16.	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,50%	-	94,37%	98,82%
17.	12a-N Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%	100%	-	106,75%	106,75%

C. Penyelenggaraan Program Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pelatihan (termasuk lokakarya/workshop/seminar/IHT) di bidang kepabeanaan dan cukai. Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan di Pusdiklat Bea dan Cukai sebanyak 3 pelatihan klasikal, 52 pelatihan jarak jauh, 76 *e-learning* dan 26 *open acces (e-learning dan microlearning)* dan 5 seminar/*open class*. Selain itu terdapat pelatihan yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pelatihan, dan yang diselenggarakan di kantor unit DJBC (kerjasama pelatihan) sebanyak 13 (tiga belas) pelatihan/IHT.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, Pusdiklat Bea dan Cukai juga telah menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan (SAK) sebanyak tiga kali penyelenggaraan, yang ujiannya dilaksanakan pada bulan Maret bertempat di 12 lokasi ujian, bulan Agustus bertempat di 9 lokasi ujian, dan bulan Oktober bertempat di 10 lokasi ujian di seluruh Indonesia. Jumlah peserta ujian terdaftar sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, jumlah peserta hadir ujian sebanyak 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) orang, dan jumlah peserta yang lulus ujian sebanyak 88 orang (9,41% dari total peserta yang mengikuti ujian). Mengingat kondisi pandemi covid-19, pelaksanaan ujian SAK tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Demikian ringkasan Lakin Pusdiklat Bea dan Cukai Triwulan IV Tahun 2021. Peningkatan kualitas kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai akan terus diupayakan dan ditingkatkan untuk menciptakan birokrasi/pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan salah satu unit eselon II yang melaksanakan tugas membina pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan, Pusdiklat Bea dan Cukai wajib menyusun Laporan Kinerja (Lakin). Lakin menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan unit pemerintahan serta capaian kinerjanya. Penyusunan Lakin Pusdiklat Bea dan Cukai selain untuk memenuhi tujuan tersebut di atas, juga dalam rangka memenuhi transparansi dan akuntabilitas kinerjanya terhadap publik. Diharapkan apa yang disajikan di dalam Lakin Triwulan IV Tahun 2021 Pusdiklat Bea dan Cukai dapat memberikan informasi yang cukup, baik kepada pihak internal maupun pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Pusdiklat Bea dan Cukai. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan penyusunan Lakin di masa mendatang. Demikian laporan ini kami susun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2022
Kepala Pusdiklat

Ditandatangani secara elektronik
Harry Mulya

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	1
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. PENDAHULUAN	4
B. VISI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI	4
C. MISI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI.....	5
D. STRATEGI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI.....	5
E. KEGIATAN.....	9
F. PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	25
C. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN.....	26
D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	30
E. ANALISIS KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN RENSTRA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI.....	32
BAB IV PENUTUP	34
A. SIMPULAN.....	34
B. SARAN.....	34
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kontrak Kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2021
- Lampiran 2 Capaian Kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2021
- Lampiran 3 Laporan pelatihan *e-learning* dan *microlearning*
- Lampiran 4 Laporan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Kontrak Kinerja IKU Pusdiklat Bea dan Cukai TA 2021	11
Tabel 3.1	Realisasi Anggaran Kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output Pusdiklat Bea dan Cukai	25
Tabel 3.2	Rencana dan Realisasi Kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output	26
Tabel 3.3	Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	27
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output Layanan Umum	27
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana Internal	28
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output Layanan Prasarana Internal	28
Tabel 3.7	Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output Layanan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	28
Tabel 3.8	Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output Layanan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan	29
Tabel 3.9	Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output Layanan SDM	29
Tabel 3.10	Target dan Capaian IKU Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2021	30

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Struktur Organisasi Pusdiklat Bea dan Cukai TA 2021.....	2
Diagram 2.1	Peta Strategi Pusdiklat Bea dan Cukai TA 2021.....	10
Diagram 3.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Klasifikasi Rincian Output TA 2021	26

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Lakin), sebagai unit Eselon II Pusdiklat Bea dan Cukai berkewajiban menyusun Lakin yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusdiklat Bea dan Cukai atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIN Pusdiklat Bea dan Cukai adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan targetnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar pencapaian kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya.

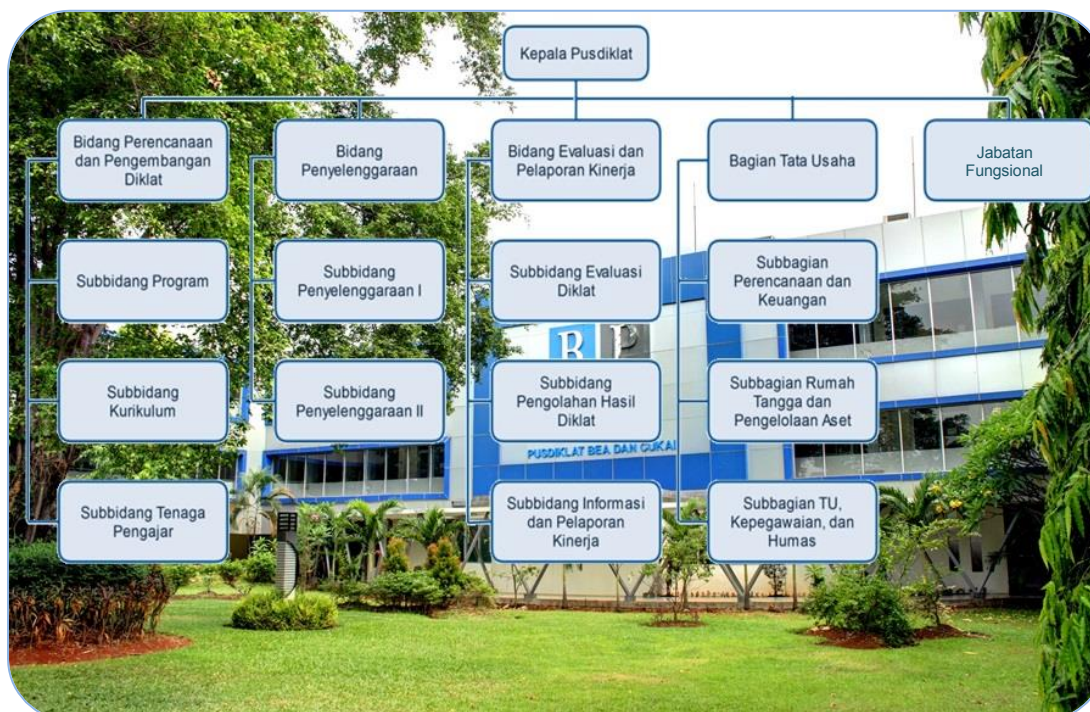
B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan unit eselon II di bawah BPPK yang mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pusdiklat Bea dan Cukai terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II, 4 (empat) jabatan eselon III, 11 (sebelas) jabatan eselon IV, dan 18 (delapan belas) jabatan fungsional meliputi 12 (dua belas) jabatan widyaiswara, 3 (tiga) jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan 1 (satu) jabatan Pranata Komputer. Struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Diagram 1.1
Struktur Pusdiklat Bea dan Cukai
TA 2021



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. PENDAHULUAN
- B. VISI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

- C. MISI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
- D. STRATEGI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
- E. KEGIATAN
- F. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
- C. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN
- D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
- E. ANALISIS KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN RENSTRA
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan aparatur yang profesional makin dirasakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya menyejajarkan diri dengan institusi kepabeanan dan cukai internasional serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara organisatoris merupakan kewajiban BPPK dalam hal ini Pusdiklat Bea dan Cukai. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pusdiklat Bea dan Cukai berupaya untuk terus menerus mengikuti dinamika organisasi DJBC untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi dan kebutuhan diklat yang diperlukan oleh DJBC.

Menurut Diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II diwajibkan mempunyai perencanaan strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima tahun mendatang. Untuk memenuhi Inpres tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyusun rencana strategik yang merupakan turunan dari Renstra BPPK dan penyesuaian dari Renstra DJBC.

B. VISI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

Visi Pusdiklat Bea dan Cukai disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi BPPK serta memperhatikan pula visi dan misi DJBC sebagai mitra kerja utama dari Pusdiklat Bea dan Cukai. Visi Pusdiklat Bea dan Cukai harus dapat mencerminkan kemampuan untuk mendukung pencapaian visi BPPK dan DJBC pada waktu yang bersamaan. Selain itu, penyusunan visi dan misi Pusdiklat Bea dan Cukai juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal (potensi dan permasalahan), dan arah organisasi ke depan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Visi Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pusdiklat di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Terkemuka di Dunia dalam rangka Mendukung Visi BPPK “Menghasilkan SDM Keuangan Negara yang Unggul dan Beretika”.

Visi Pusdiklat Bea dan Cukai ini merupakan penyempurnaan dari visi pada periode Renstra 2015-2019. Visi ini memberikan pedoman yang lebih jelas untuk Pusdiklat Bea dan Cukai tentang apa yang ingin dicapai di akhir periode renstra ini. Sesuai dengan arah penataan organisasi, maka Pusdiklat Bea dan Cukai tidak lagi menyelenggarakan fungsi pendidikan dan hanya melaksanakan fungsi pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai.

C. MISI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

Untuk mewujudkan visi Pusdiklat Bea dan Cukai serta mendukung pelaksanaan misi BPPK, Pusdiklat Bea dan Cukai kemudian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai dalam kerangka Kementerian Keuangan Corporate University.
2. Mengelola program sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang berkualitas dan fit for purposes.
3. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan Corporate University.
4. Melaksanakan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.
5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi-institusi terbaik di tingkat regional maupun internasional.

D. STRATEGI PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

Pusdiklat Bea dan Cukai menjabarkan 5 misi diatas kedalam strategi yang akan dijalankan. Misi dan strategi Pusdiklat Bea dan Cukai pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Keuangan dan mencapai sasaran strategis BPPK dan Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai berikut:

Strategi untuk mencapai misi pertama yaitu:

1. Penguatan pembelajaran yang mengedepankan karakteristik RAI A (*Relevant, Applicable, Impactful, dan Accessible*) dan bermuatan etika melalui:

- a. Penyelarasan AKP strategis dengan tujuan strategis organisasi yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun isu-isu strategis lain yang disepakati dalam *Learning Council Meeting*.
 - b. Penguatan model pembelajaran terintegrasi (10:20:70) maupun dengan model *Pervasive Learning* (3-33: 33% of the learning is formal, 33% is informal, 33% is social).
 - c. Optimalisasi *learning impact measurement* (IKU Evaluasi Level 4 untuk pembelajaran klasikal dan *e-learning*) dan sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - d. Proporsi pelatihan dengan evaluasi Level 4 minimal sebesar 25% dari pelatihan strategis.
 - e. Diversifikasi program dan moda pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap pegawai dengan pendekatan pembelajaran *heutagogy* serta sesuai dengan protokol *new normal*.
 - f. Memasukkan unsur muatan etika pada setiap pembelajaran baik melalui program kedisiplinan (MFD), penilaian kedisiplinan/*attitude*, dan kesamaptaan.
2. Optimalisasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis digital bagi SDM keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai, melalui:
 - a. Implementasi pembelajaran digital 50% (2020), 70% (2021-2023), 80% (2024).
 - b. Diversifikasi metode pembelajaran menggunakan jarak jauh/digital sebagai alternatif pembelajaran tatap muka (tidak terbatas pada Pelatihan Jarak Jauh, Kemenkeu Corpu *Talk/open class*, *open access course*, *game-based learning*, dan lain-lain).
 - c. Mengadopsi *gamification* dalam sistem pembelajaran diselaraskan dengan sistem kinerja dan *reward system* Kementerian Keuangan.
 - d. Peningkatan kuantitas (*growth* 20%) dan kualitas materi pembelajaran digital.
 - e. Kurasi pembelajaran digital eksternal BPPK (nasional/*worldwide*) yang relevan dengan kebutuhan strategis Kementerian Keuangan untuk diintegrasikan ke dalam *platform* KLC.
 3. Implementasi sistem penjaminan kualitas pembelajaran melalui:
 - a. Implementasi standar mutu pada setiap proses pembelajaran dimulai dari proses AKP, desain pembelajaran, validasi program, penyelenggaraan

- pembelajaran, evaluasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Melaksanakan monitoring standar mutu, evaluasi diri, dan perbaikan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan
 - c. Memperluas jangkauan penjaminan kualitas pembelajaran pada Unit Eselon I Kemenkeu (*IKU Learning Organization*).

Strategi untuk mencapai misi kedua yaitu:

Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien dengan melakukan:

- a. Penyusunan kerangka, sistem, dan proses bisnis pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
- b. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang kepabeanan dan cukai bagi SDM keuangan negara (DJBC dan Kementerian Keuangan) sebagai antisipasi jabatan-jabatan fungsional pengelola keuangan negara.

Strategi untuk mencapai misi ketiga yaitu:

1. Penerapan manajemen pengetahuan yang mendukung budaya berbagi pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan bagi solusi kinerja SDM keuangan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai melalui:
 - a. Internalisasi program budaya berbagi pengetahuan.
 - b. Penerapan *gamification* dan *reward system* dalam *Knowledge Management* (KM)/pembelajaran.
2. Identifikasi dan kodifikasi pengetahuan di bidang Kepabeanan dan Cukai melalui:
 - a. Identifikasi pengetahuan di bidang kepabeanan dan cukai yang relevan dan dibutuhkan, yang tersedia pada internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - b. Kodifikasi pengetahuan di bidang kepabeanan dan cukai, di mana pengetahuan dikodifikasi dengan menggunakan pendekatan "*people to documents*". Pengetahuan yang telah diidentifikasi, diambil dari orang yang mengembangkannya atau melekat pada jenis pekerjaannya, didokumentasikan dalam berbagai media (video, tulisan, dan lain-lain), kemudian disimpan pada sebuah sistem (pemanfaatan KLC, Majalah Edukasi Keuangan, dan sejenisnya) yang memungkinkan pengetahuan tersebut digunakan kembali untuk tujuan lain.

Strategi untuk mencapai misi keempat yaitu:

1. Implementasi Penataan Organisasi dalam rangka Penguatan Implementasi Kemenkeu Corporate University dengan cara:
 - a. Menjalankan fungsi Pusdiklat Bea dan Cukai dalam *shadow structure* yang merupakan perwujudan elemen-elemen dalam *House of* Kemenkeu Corporate University.
 - b. Optimalisasi fungsi pengembangan pelatihan pada Pusdiklat Bea dan Cukai.
 - c. Otomasi proses bisnis dalam rangka simplikasi dan efisiensi penyediaan layanan pembelajaran.
2. Pengembangan kompetensi SDM berbasis fungsi yang aplikatif dan berdampak tinggi melalui:
 - a. Penyusunan *Service Level Agreement*.
Sebagai wujud perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) layanan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan manajemen pengetahuan, maka Pusdiklat Bea dan Cukai perlu mengembangkan *Service Level Agreement* (SLA) untuk membantu identifikasi harapan *stakeholders* terhadap layanan, memperjelas tanggung jawab, dan memfasilitasi komunikasi antara Pusdiklat Bea dan Cukai dengan *stakeholders*.
 - b. Pengembangan kompetensi SDM Pusdiklat Bea dan Cukai yang berpedoman pada standar kompetensi jabatan setiap pegawai.
 - c. Pengembangan kompetensi SDM Pusdiklat Bea dan Cukai untuk mengantisipasi penataan organisasi dan *delayering* sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan.
 - d. *Change management* (termasuk program peningkatan *engagement* pegawai)
3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran
 - a. Penguatan SEMANTIK sebagai *back office* pembelajaran (integrasi dengan bank soal, ujian online, KLC)
 - b. *Big Data Analysis*
 - c. Pembaruan perangkat IT untuk mendukung terwujudnya *modern e-learning* dan *flexible working space*.

Strategi untuk mencapai misi kelima yaitu:

Penguatan kemitraan strategis dengan institusi pelatihan terbaik di tingkat regional dan internasional dengan cara:

- a. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi-institusi regional dan internasional di bidang Kepabeanan dan Cukai serta institusi terkait lainnya dalam rangka pendidikan, pelatihan, *knowledge management*, dan sertifikasi.
- b. Penetapan Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai *Regional Training Center WCO*
- c. Kurasi konten pembelajaran dengan pihak eksternal.

E. KEGIATAN

Subbab ini menjelaskan kegiatan Pusdiklat Bea dan Cukai yang merupakan rencana kerja di tahun 2021. Pada tahun 2021 Pusdiklat Bea dan Cukai semula mengelola DIPA sebesar Rp. 30.083.124.000,- (*Tiga puluh milyar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pusdiklat Bea dan Cukai selama tahun 2021, kemudian dikurangi jumlahnya menjadi sebesar Rp 28.259.628.000,- (*Dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*). Pada bulan Juli dikurangi lagi menjadi sebesar Rp 23.668.817.000,- (*Dua puluh tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*). Pengurangan pagu tersebut disebabkan terjadi *refocusing* anggaran sebanyak 2 (dua) kali selama kurun waktu bulan Juli dalam rangka penghematan untuk penanganan pandemi covid-19.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai selama tahun 2021 yaitu:

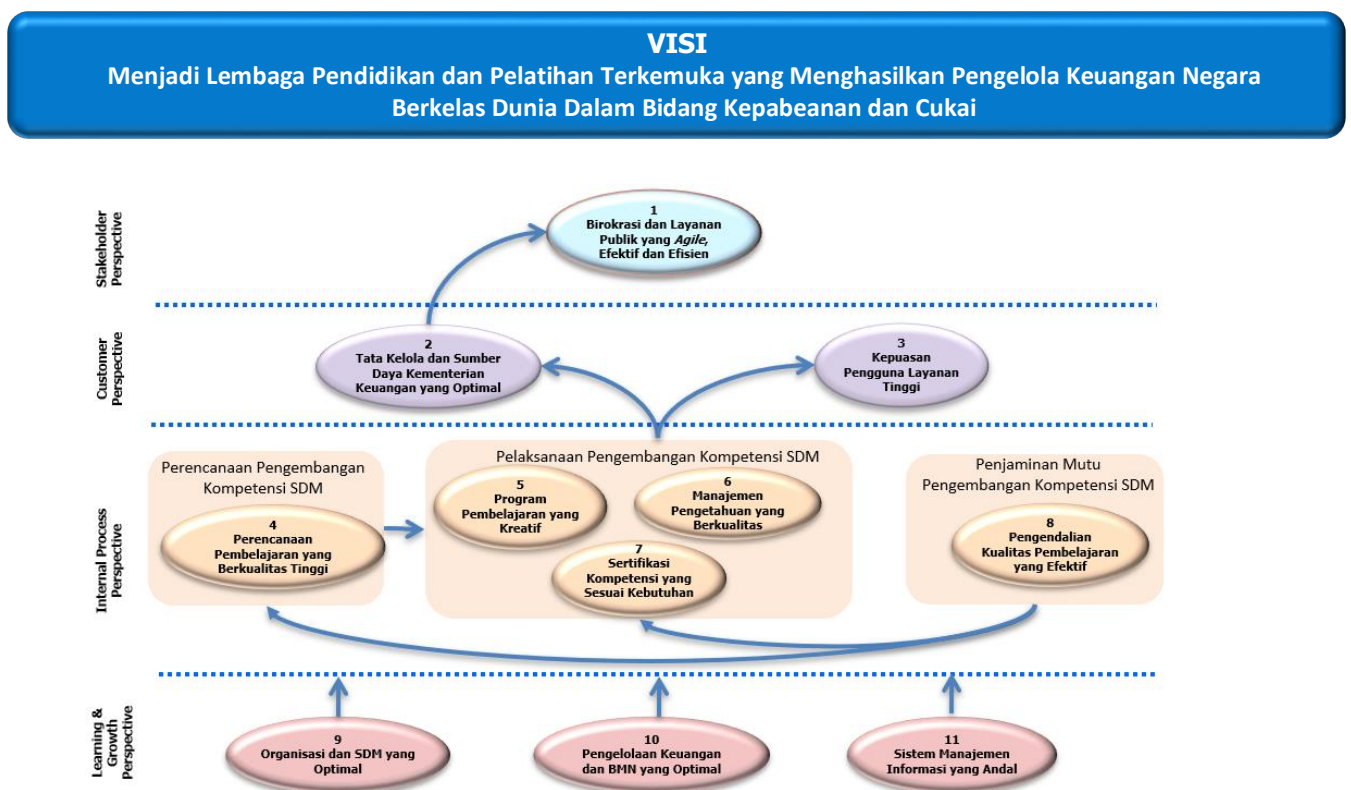
PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Output yang harus dipenuhi Pusdiklat Bea dan Cukai dalam kegiatan tersebut adalah sejumlah 7 (tujuh) output, yaitu layanan perencanaan dan penganggaran internal sebanyak 1 layanan, layanan umum sebanyak 37 layanan, layanan sarana internal sebanyak 907 unit, layanan prasarana internal sebanyak 20.736 m², pengelolaan keuangan dan kinerja internal sebanyak 2 dokumen, kebijakan bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 2 rekomendasi kebijakan dan layanan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 699.165 orang.

F. PERJANJIAN KINERJA

Pada bulan Januari 2021 telah ditandatangani kontrak kinerja antara Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai dengan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Adapun isi di dalam Kontrak Kinerja tersebut berupa Peta Strategi dan rincian target capaian kinerja yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2021. Berikut ini adalah peta strategi Pusdiklat Bea dan Cukai:

Diagram 2.1.
Peta Strategi Pusdiklat Bea dan Cukai TA 2021



Bahwa dalam mencapai visinya, dibutuhkan SDM yang kompeten, organisasi yang efektif, TIK yang tepat guna serta pengelolaan keuangan dan aset yang optimal dan akuntabel. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut diharapkan akan tercipta program yang akomodatif, proses pembelajaran yang kreatif dan efektif, yang ditunjang pula dengan evaluasi kebijakan yang komprehensif. Capaian dari produk utama Pusdiklat Bea dan Cukai dapat dilihat atau dirasakan oleh pengguna layanan Pusdiklat Bea dan Cukai, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu berupa lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Dengan tercapainya kepuasan dari pengguna layanan atas produk utama Pusdiklat

Bea dan Cukai, tercapai pula kontribusi Pusdiklat Bea dan Cukai kepada Kementerian Keuangan berupa SDM keuangan negara berkompetensi tinggi. Kontribusi ini akan mengantarkan Pusdiklat Bea dan Cukai mewujudkan visinya yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang berkelas dunia. Berikut ini adalah kontrak kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai:

Tabel 2.1. Kontrak Kinerja IKU Pusdiklat Bea dan Cukai TA 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengembangan SDM terintegrasi berdampak kinerja yang optimal	1a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	80%
2.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian Keuangan yang optimal	2a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	84%
3.	Kepuasan pengguna layanan tinggi	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,41 (skala 5)
4.	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi	4b-CP Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%
5.	Program pembelajaran yang kreatif	5a-CP Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%
		5b-N Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja kementerian keuangan	0,7177%
6.	Evaluasi pembelajaran yang optimal	6a-CP Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%
		6b-N Indeks persepsi peserta pelatihan	4,33 (skala 5)
7.	Manajemen pengetahuan yang berkualitas	7a-CP Tingkat pemanfaatan <i>knowledge</i> pada platform KLC	100%
8.	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan	8a- CP Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	80%
9.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif	9a-CP Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	5 (skala 5)
10.	Organisasi dan SDM yang optimal	10a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	100%
		10b-CP Indeks integritas	90,10 (skala 100)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10c-N Persentase pelaksanaan kajian, <i>knowledge capture</i> , dan aktualisasi pembelajaran	100%
		10d-N Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	85%
11.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
12.	Sistem manajemen informasi yang andal	12a-N Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya

SDM yang berkompotensi tinggi adalah SDM Kementerian Keuangan yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik *hard* maupun *soft competencies*. SDM keuangan negara berkompotensi tinggi diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang luas sesuai dengan bidangnya.

Tujuan IKU ini adalah mengukur keberhasilan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu. Dalam IKU ini, alumni pelatihan yang dievaluasi adalah alumni pelatihan yang telah lolos evaluasi Kirkpatrick sampai dengan level 3, yaitu telah mengimplementasikan materi pelatihan dan menunjukkan perubahan perilaku kerja. Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah tenaga pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya yang dapat meningkatkan kompetensi peserta diklat. Alumni pelatihan yang diukur harus memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti. Program pelatihan yang akan dievaluasi dan indikator yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan kurikulum (desain pembelajaran). Indikator keberhasilan level 4 adalah adanya peningkatan kinerja setelah pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data capaian kinerja individu atau unit sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Indikator pengukuran kinerja sebelum dan setelah pelatihan dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain. Pengukuran dilakukan antara lain dengan mengevaluasi *capaian leading indicators*, *desired result*, *isolasi/group control*, *trend lines* dan penilaian dari atasan. Evaluasi dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan. Formula untuk penghitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$Realisasi = (50\% \times \text{Komponen A}) + (30\% \times \text{Komponen B}) + (20\% \times \text{Komponen C})$	
Komponen A :	<i>Persentase Peserta yang lulus Epaspem Level 4 dibanding Subjek yang di Evaluasi Level 4</i>

<i>Komponen B :</i>	<i>Persentase Peserta yang lulus Epaspem Level 4 dibanding Subjek yang di Evaluasi Level 3</i>
<i>Komponen C :</i>	<i>Persentase Peserta yang lulus Epaspem Level 4 dibanding Subjek yang di Evaluasi Level 2</i>

IKU ini adalah IKU dengan target semesteran dengan target sebesar 80%. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar 82,74% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 103,42%.

2. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kualitas Perilaku Kerjanya

Program pendidikan dan pelatihan adalah program pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan tuntutan pemenuhan Standard Kompetensi Jabatan, baik berupa *hard competency* maupun *soft competency*. Program pendidikan dan pelatihan yang diukur peningkatan kualitas perilaku kerja alumninya adalah program pendidikan dan pelatihan untuk Kementerian Keuangan yang dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas perilaku kerja alumninya setelah mengikuti program pelatihan di Pusdiklat dan Balai Diklat, baik Klasikal maupun Pelatihan Jarak Jauh. Program pelatihan yang diukur adalah program pelatihan yang diselenggarakan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

IKU ini mengukur perubahan perilaku kerja (evaluasi Kirkpatrick level 3) setelah mengikuti pengembangan kompetensi. Pengukuran difokuskan pada munculnya perilaku yang sesuai dengan tujuan kurikulum pelatihan yang dievaluasi. Perilaku tersebut dapat dirinci ke dalam bentuk perilaku yang mencerminkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap. Metode yang digunakan adalah survei 360° yang dilaksanakan secepatnya 3 bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan. Data diperoleh melalui evaluasi pascapembelajaran terhadap program-program pelatihan yang dirancang oleh Pusdiklat. Dalam hal jumlah program pelatihan yang harus diukur terlalu banyak sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran seluruhnya, akan dilakukan sampling atas program-program pelatihan tersebut. Responden adalah alumni pelatihan, atasan, rekan kerja, bawahan (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360°. Responden yang datanya digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas perilaku kerja adalah alumni pelatihan yang ditempatkan dalam posisi/jabatan dimana pegawai tersebut bisa menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dipelajari. Peningkatan perilaku diukur berdasarkan pendapat responden atas seorang alumni pelatihan minimal memenuhi 50% dari jumlah responden yang disurvei.

IKU ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$\frac{\Sigma \text{Jumlah Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kualitas Perilaku Kerjanya}}{\Sigma \text{Jumlah Alumni Pelatihan yang Menerapkan Kompetensi}} \times 100\%$
--

IKU ini adalah IKU dengan target semesteran dengan target sebesar 84%. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar 100% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 119,05%.

3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. Lingkup survei adalah pelanggan atas seluruh pelayanan BPPK kepada pihak eksternal. IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh BPPK secara keseluruhan yang diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

IKU ini merupakan bagian dari sasaran strategis “Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi”, masuk ke dalam kategori *customer perspective* dan diukur dengan menilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan.

Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah kesigapan seluruh pegawai Pusdiklat Bea dan Cukai dalam menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang dampak positifnya dapat juga dirasakan oleh pihak eksternal.

IKU ini adalah IKU dengan target tahunan dengan target sebesar 4,41. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar 4,63 sehingga capaian IKU ini sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 104,99%.

4. Persentase Program Pelatihan yang Mendapat Nilai Validasi A

Validasi pelatihan adalah pengesahan terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pelatihan dan materi pelatihan dengan kebutuhan peserta pelatihan dan tujuan diadakannya pelatihan tersebut. Program pelatihan yang divalidasi adalah Program pelatihan hasil rancangan Pusdiklat. Program pelatihan yang mendapat nilai validasi A adalah jika nilai tiap komponen mendapatkan nilai minimal 4, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai kurang dari 3 dan dinyatakan tervalidasi baik sekali.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelatihan yang diselenggarakan. Kualitas suatu pelatihan dapat dilihat dari tingkat efektivitas pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menutup kesenjangan kompetensi teknis tertentu. IKU ini bermanfaat untuk menjadi dasar dalam *capacity building* bagi SDM perancang pelatihan maupun dasar perbaikan sistem dan mekanisme perancangan pelatihan di BPPK. Formula IKU ini sebagai berikut:

$\frac{\Sigma \text{Jumlah program pelatihan yang mendapat nilai validasi A pada tahun 2021}}{\Sigma \text{Jumlah program pelatihan yang divalidasi pada tahun 2021}} \times 100\%$

IKU ini adalah IKU dengan target semesteran dengan target sebesar 100%. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar 100% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 100%.

5. Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital

Pembelajaran digital adalah jenis pelatihan yang diselenggarakan secara *full e-learning* oleh Pusdiklat/Balai Diklat. IKU yang mengukur rasio antara pembelajaran yang dilaksanakan secara *full e-learning* dengan klasikal/tatap muka. IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

<i>Realisasi = (60% x Komponen a) + (40% x Komponen b)</i>	
<i>Komponen a</i>	<i>$\frac{\Sigma \text{Jumlah Program E-Learning yang diselenggarakan}}{\Sigma \text{Jumlah seluruh Program yang diselenggarakan}}$</i>
<i>Komponen b</i>	<i>$\frac{\Sigma \text{Jumlah Peserta Program E-Learning yang diselenggarakan}}{\Sigma \text{Jumlah seluruh Peserta Pelatihan}}$</i>

Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar 98,04% dengan target sebesar 70,00% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 140,06%

6. Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan

Program pembelajaran yang kreatif adalah program pendidikan dan pelatihan yang didesain sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan dan selalu *diupdate* berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan serta evaluasi hasil pelatihan. Jam pelatihan (jamlat) adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Kementerian Keuangan dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat. Pelatihan adalah seluruh kegiatan pelatihan yang dibiayai dengan DIPA Kementerian Keuangan, selain Pascasarjana, Diploma, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Sertifikasi. Jam kerja pegawai adalah jam kerja per tahun dikalikan dengan jumlah *potential trainees* pada Kementerian Keuangan pada tahun bersangkutan.

Polarisasi IKU ini akan *stabilize* pada target 5%, yang setara dengan 75 jam pelatihan dalam setahun. Apabila suatu unit belum menargetkan 5%, maka polarisasi IKU ini adalah *maximize*, dengan formula:

$\frac{\text{Total Jam Pelatihan yang Diikuti SDM Kementerian Keuangan}}{\text{Total Jam Kerja}} \times 100\%$
--

Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah 0,8048% dengan target sebesar 0,7177% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 112,14%.

7. Persentase Lulusan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik

Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan adalah lulusan diklat yang mampu mengaplikasikan dengan baik hasil pembelajaran dalam diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi.

IKU ini merupakan bagian dari sasaran strategis “Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi sesuai dengan Kebutuhan”, masuk ke dalam kategori *customer perspective* dan diukur dengan menilai peningkatan kompetensi SDM yang tahun ini ditargetkan sebesar 93%. Formula untuk penghitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jumlah Peserta Pelatihan yang Lulus Ujian dengan Predikat Minimal Baik}}{\sum \text{Jumlah Peserta Pelatihan yang Mengikuti Ujian}} \times 100\%$$

Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah keberhasilan tenaga pengajar menyampaikan materi secara profesional dengan cara yang mudah dipahami peserta diklat.

Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah 94,78% dengan target sebesar 93,00% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 101,91%.

8. Indeks Persepsi Peserta Pelatihan

Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran merupakan nilai yang menggambarkan apa yang dirasakan oleh peserta pelatihan mengenai pelayanan penyelenggaraan pembelajaran dan kualitas pengajar.

Alat survei dan metode penghitungan yang digunakan mengacu pada Peraturan Kepala BPPK nomor Per-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (klasikal dan *e-learning*) dan KEP-82/PP/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (*distance learning*) di Lingkungan BPPK.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat berdasarkan persepsi peserta diklat.

IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

<i>Realisasi =</i>	<i>Rata-rata Indeks Evaluasi Pembelajaran dari setiap Pelatihan yang Diselenggarakan</i>
<i>Rata-rata dihitung dari Pelatihan di awal tahun</i>	

Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah indeks 4,75, dengan target indeks sebesar 4,33 sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 109,70%.

9. Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform KLC*

Kemenkeu *Learning Center* (KLC) merupakan media pembelajaran *online* yang berisi berbagai materi tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum.

IKU ini bertujuan mengukur tingkat pemanfaatan materi pembelajaran di bidang Keuangan Negara pada KLC. *Knowledge* yang diukur pemanfaatannya dalam IKU ini adalah seluruh materi (baik yang disusun pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 maupun 2021) yang ada pada menu *knowledge center* dan juga meliputi pengelolaan *Community of Practice (CoP)*. Tingkat pemanfaatan *knowledge* diukur dengan menghitung tingkat pengelolaan CoP, kualitas konten, *bounce rate* dan jumlah *unique page views* dari video yang dihasilkan pada KLC mulai tanggal 1 Januari 2021 yang diperoleh dari data *google analytic*. Materi berupa tutorial yang sifatnya umum (contoh: tutorial mengisi aplikasi Semantik) tidak diperhitungkan. IKU yang mengukur kualitas pengelolaan CoP, tingkat *engagement* pengguna KLC (dilihat dari *bounce rate* dan jumlah *unique pageview*), dan kualitas konten (survei kepuasan pengguna KLC).

IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$Realisasi = (20\% \times A) + (10\% \times B) + (30\% \times C) + (40\% \times D)$
$A = \text{Pengelolaan CoP}$
$B = \text{Bounce Rate}$
$C = \text{Unique Pageview atas konten Knowledge Center}$
$D = \text{Kualitas Konten}$

Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah 118,00% dengan target sebesar 100% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 118%.

10. Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi

Kualitas implementasi program sertifikasi merupakan jaminan kualitas penyelenggaraan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat tertentu di lingkungan BPPK. Ujian sertifikasi diikuti oleh peserta ujian sertifikasi yang berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan maupun non Kementerian Keuangan (masyarakat umum) dalam rangka untuk memperoleh sertifikat keahlian di bidang tertentu. Sertifikasi yang diukur adalah sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA), sertifikasi Jabatan Fungsional Penilai Pajak (JFPP) dan sertifikasi Ahli Kepabeanan atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Realisasi IKU ini dihitung dengan menjumlahkan nilai persentase kepuasan peserta atas penyelenggaraan sertifikasi/kesesuaian janji layanan dengan nilai persentase kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi.

IKU ini dihitung dengan formula:

- a. Persentase kepuasan peserta atas penyelenggaraan sertifikasi/kesesuaian janji layanan (bobot 40%). Metode yang digunakan adalah survey (skala 4) yang dilakukan setelah ujian dilaksanakan dengan responden adalah peserta ujian sertifikasi yang dinyatakan lulus. Peserta dinyatakan puas apabila menilai ≥ 3 pada minimal 50% aspek yang dinilai, dengan target kepuasan adalah 80%. $(\text{Jumlah peserta yang puas} / \text{Jumlah peserta yang lulus ujian sertifikasi}) \times 40\%$.
- b. Persentase kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi (bobot 60%), dengan formula: $(\text{Tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi} \times 60\%)$.

IKU ini adalah IKU dengan target tahunan sebesar 80%. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar 100% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 125%.

11. Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelatihan di semua unit di lingkungan BPPK, mulai dari analisis kebutuhan, desain pembelajaran, validasi program, layanan penyelenggaraan, evaluasi pembelajaran, dan sarana prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini mengukur tingkat kepatuhan BPPK dalam menyelenggarakan pelatihan dengan standar/pedoman yang berlaku. IKU ini diukur dengan indeks skala 1 – 5.

IKU ini adalah IKU dengan target semesteran dengan target sebesar indeks 5. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar indeks 5 sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 100%.

12. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya melalui sistem penempatan yang sesuai standar kompetensi jabatan (SKJ). SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang cukup yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas organisasi, melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya BPPK dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensinya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan diklat dan pencapaian tujuan organisasi lainnya. IKU ini bermanfaat untuk mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan SDM BPPK dengan Sekretariat Badan melalui penempatan pejabat yang kompeten.

IKU ini juga untuk mengukur persentase pejabat di lingkungan BPPK yang mempunyai tingkat kesesuaian kompetensi jabatan minimal 80%. Kompetensi yang diukur dalam IKU ini adalah kompetensi manajerial. Pejabat yang memasuki batas Usia Pensiun (BUP) tidak termasuk dalam perhitungan.

Yang menjadi objek pengukuran IKU ini adalah pejabat di lingkungan Pusdiklat. IKU ini dapat diukur dengan formula sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah Pejabat yang Telah Mengikuti Assessment}}$	$\times 50\%$	+	$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang nilai AC kadaluarsa dan telah di re - AC 2021}}{75\% \text{ Pejabat yang nilai AC kadaluarsa 2021}}$	$\times 50\%$
--	---------------	---	---	---------------

Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan dalam melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang diembannya.

IKU ini adalah IKU dengan target tahunan dengan target sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2020 adalah 92,86% sehingga capaian IKU ini sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 92,86%.

13. Indeks Persepsi Integritas

Indeks persepsi integritas (IPI) diperoleh dari hasil Penilaian Persepsi Integritas yang dikembangkan dari *Integrity Assessment* yang telah dilaksanakan oleh KPK.

1. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh A1Itjen.
2. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.

3. Responden survei adalah seluruh pegawai di unit sampel (internal), dan sampel pengguna layanan di masing-masing unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau unit eselon I lain di Kementerian Keuangan (eksternal). Penetapan responden eksternal ditetapkan oleh Tim survey
4. Metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Survei (responden internal dan eksternal);
 - b. *Focus Group Discussion* (FGD); FGD per zona wilayah yang ditetapkan tim survei Kementerian Keuangan.
 - c. Penilaian Lapangan (Observasi, Wawancara, Reviu Dokumen).

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kementerian Keuangan (responden eksternal) . Penilaian lapangan dilakukan selama periode survei oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) masing-masing unit eselon I. Perhitungan capaian IKU ini diukur melalui hasil pembobotan nilai hasil survei internal dan/atau eksternal yang dapat disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan Penilaian Lapangan dengan formula:

<i>Realisasi</i> =	$(45\% \times \text{Nilai Internal}) + (45\% \times \text{Nilai Eksternal}) + (10\% \times \text{Nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi}$
--------------------	---

IKU ini adalah IKU dengan target tahunan dengan target sebesar indeks 90,10. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar indeks 91,06 sehingga capaian IKU ini sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 101,07%.

14. Persentase Pelaksanaan Kajian, *Knowledge Capture*, dan Aktualisasi Pembelajaran

Kajian adalah output kegiatan mengkaji secara sistematis dan menyeluruh dalam rangka mengembangkan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan negara, bidang manajemen SDM, dan bidang kediklatan. Dalam satu riset maksimal dilaksanakan oleh dua peneliti baik widyaiswara dengan widyaiswara maupun widyaiswara dengan non-Widyaiswara. Hasil kajian dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang ditulis sesuai dengan kaidah penulisan akademis yang berlaku. Pengujian dalam bentuk presentasi/seminar digunakan menguji aspek metodologis maupun substansi kajian. Presentasi/seminar dilakukan minimal satu kali untuk tahapan proposal dan satu kali untuk tahap hasil kajian.

IKU ini merupakan bagian dari sasaran strategis “Organisasi yang *fit for purpose*”, masuk ke dalam kategori *learning and growth perspective*. Output kegiatan *knowledge capture* yang diakui dalam IKU ini adalah dalam *knowledge capture* yang dituangkan

dalam bentuk buku dan video. Rencana dan TOR pembuatan setiap video/buku harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusdiklat.

Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai suatu organisasi mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar 109,33% dengan target sebesar 100% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 109,33%.

15. Persentase Penugasan Pelatihan yang Sesuai AKP

Pelatihan adalah peningkatan keterampilan serta pembentukan sikap dan perilaku dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai metode dan sumber untuk mendukung pencapaian target organisasi.

Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program-program pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rencana Penugasan pelatihan sesuai AKP mengacu pada rencana penugasan pelatihan pegawai BPPK tahun 2021.

IKU ini bertujuan untuk mengukur komitmen organisasi dalam mengembangkan kompetensi pegawai.

IKU ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$\text{Realisasi} = \frac{\Sigma \text{realisasi penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP regular}}{\Sigma \text{rencana}} \times 100\%$
--

IKU ini adalah IKU dengan target tahunan sebesar 85%. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 sebesar 99,16% sehingga capaian IKU sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 116,66%.

16. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu:

- a. Penyerapan anggaran, yaitu realisasi anggaran atas Belanja Barang dan Belanja Modal, tidak termasuk Belanja Pegawai, yang mengacu pada Sistem Akuntansi Umum (SAU);

- b. Pencapaian Keluaran, yaitu pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan;
- c. Konsistensi dalam penyerapan anggaran untuk periode bulanan, triwulan dan tahunan;
- d. Efisiensi, yaitu hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarasannya telah dicapai (pencapaian *output*-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian *output* tidak mencapai 100%, maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan/belanja lainnya

IKU ini merupakan bagian dari sasaran strategis “Pengelolaan Keuangan yang Optimal”. IKU ini masuk ke dalam kategori *learning and growth perspective*.

Ruang lingkup perhitungan IKU mencakup dua aspek, yaitu:

- a. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA (SE Menteri Keuangan No. 8/2020) yang terdiri dari capaian keluaran (SMART DJA), efisiensi (SMART DJA), konsistensi (SMART DJA & IKPA) dan penyerapan anggaran atas pagu neto (SE-35).
- b. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPb (Perdirjen Perbendaharaan No. 4/2020) yang terdiri dari penyelesaian tagihan, data kontrak, penyelesaian UP, penyampaian renkas, penyampaian LPJ, kesalahan SPM, retur SP2D, revisi DIPA, pagu minus, dan dispensasi.

IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Capaian IKU PKPA Triwulan I	= Capaian IKPA Januari s.d. Maret
Capaian IKU PKPA Triwulan II	= Capaian IKPA Januari s.d. Juni
Capaian IKU PKPA Triwulan III	= Capaian IKPA Januari s.d. September
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	= 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Tujuan IKU ini adalah mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas pagu neto, keluaran riil, efisiensi dan konsistensi (SE-8/MK.1/2020) dan 12 indikator pelaksanaan anggaran dari DJPB. Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui kinerja satker dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal.

Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah pembayaran tagihan tepat waktu dan optimalisasi anggaran untuk mencapai output yang lebih besar.

Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV 2021 adalah 94,37% dengan target 95,5% sehingga capaian IKU ini sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 98,82%.

17. Persentase Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik

Aplikasi Semantik adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh BPPK untuk membantu proses administrasi penyelenggaraan diklat, mulai dari perencanaan (kalender diklat) sampai dengan evaluasi (penerbitan sertifikat).

IKU ini mengukur ketepatan waktu Pusdiklat dalam menginput kelengkapan data terkait penyelenggaraan pelatihan.

Kegiatan yang menjadi tolak ukur kelengkapan data adalah:

1. Input nama pengajar pada jadwal diklat;
2. Input rekapitulasi kehadiran peserta;
3. Pengiriman data kelulusan peserta.

Pelatihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah pelatihan yang diselenggarakan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 sedangkan Penyelenggaraan *open access* dan seminar dikecualikan dari penghitungan IKU ini. IKU ini merupakan bagian dari sasaran strategis “Sistem manajemen informasi yang andal”, masuk ke dalam kategori *learning and growth perspective* dan diukur dengan formula sebagai berikut :

Kegiatan	Waktu	Nilai
Input rekomendasi pengajar	s.d. H-1 pelatihan dibuka	110%
	s.d pelatihan ditutup	100%
	Setelah penutupan	20%
Input rekap kehadiran	saat pelatihan ditutup	110%
	H+1 hari kerja setelah penutupan	100%
	H+2 hari kerja setelah penutupan	90%
	H+3 hari kerja setelah penutupan	80%
	H+4 hari kerja setelah penutupan	70%
	H+5 hari kerja penutupan	50%
	>H+5 hari kerja setelah penutupan	20%
Pengiriman data kelulusan peserta (non kelulusan)	< 15 hari kalender setelah pelatihan ditutup	110%
	15 hari kalender setelah pelatihan ditutup	100%
	H+16 hari kalender setelah pelatihan ditutup	90%
	H+17 hari kalender setelah pelatihan ditutup	80%
	H+18 hari kalender setelah pelatihan ditutup	70%
	H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup	50%
	>H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup	20%
Pengiriman data kelulusan peserta (pelatihan dengan kelulusan)	< 30 hari kalender setelah pelatihan ditutup	110%
	30 hari kalender setelah pelatihan ditutup	100%
	H+31 hari kalender setelah pelatihan ditutup	90%
	H+32 hari kalender setelah pelatihan ditutup	80%

	H+33 hari kalender setelah pelatihan ditutup	70%
	H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup	50%
	>H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup	20%
Rata-rata pemenuhan basis data pada aplikasi Semantik		

Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah pemutakhiran *database* dalam aplikasi semantik yang dilaksanakan secara tepat waktu di setiap Bidang di Pusdiklat.

Realisasi untuk IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah 106,75% dengan target sebesar 100% sehingga capaian IKU ini sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 106,75%.

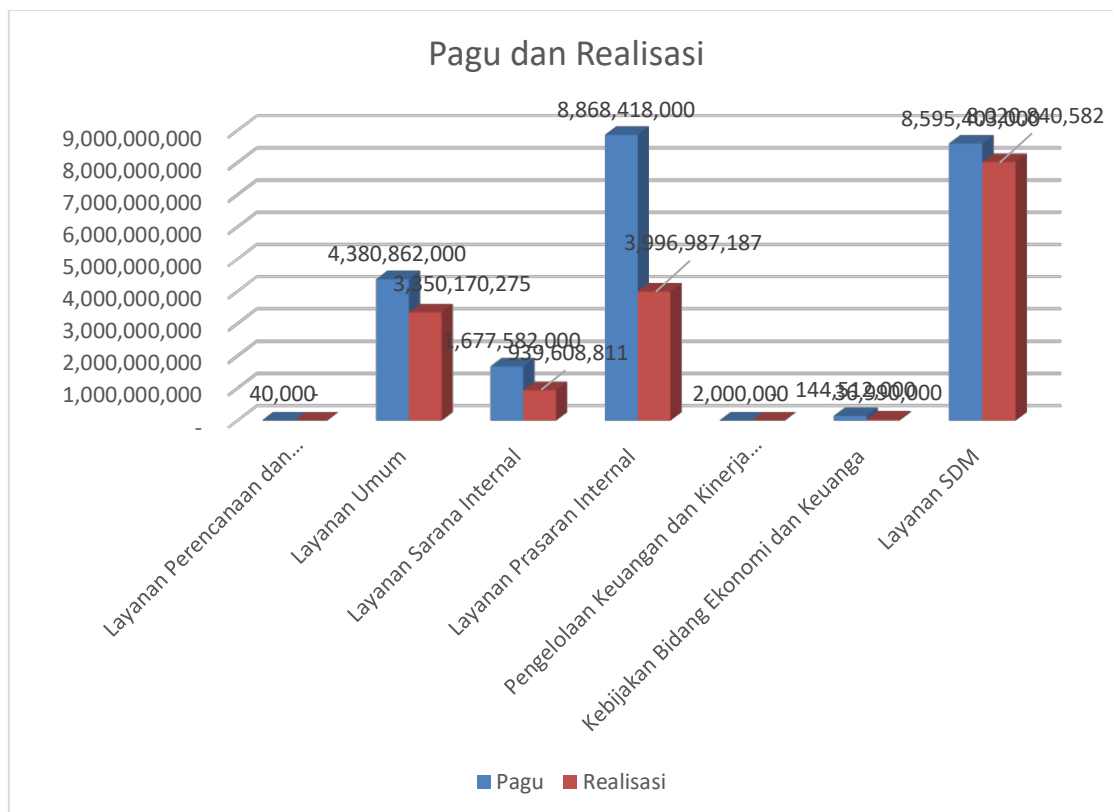
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, Pusdiklat Bea dan Cukai telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 16,344,596,855 atau sekitar 69,06% dari rencana anggaran sebesar Rp 23,668,817,000.

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output Pusdiklat Bea dan Cukai sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

KEGIATAN/OUTPUT		PAGU	REALISASI	CAPAIAN	SALDO
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
(1)		(2)	(3)	(4) = (3/2) x 100%	(5) = (2) - (3)
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen				
4679.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	40,000	-	0,00%	40,000
4679.EAC	Layanan Umum	4,380,862,000	3,350,170,275	77,50%	972,691,725
4679.EAD	Layanan Sarana Internal	1,677,582,000	939.608.811	57,29%	700,473,189
4679.EAE	Layanan Prasarana Internal	8,868,418,000	3,996,987,187	44,59%	4,966,930,813
4679.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2,000,000	-	0,00%	2,000,000
4683.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	144,512,000	36,990,000	25,60%	107,522,000
4683.EAF	Layanan SDM	8,595,403,000	8,020,840,582	93,32%	535,761,602
JUMLAH		23,668,817,000	16,344,596,855	69,06%	7,285,419,329

Diagram 3.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Klasifikasi Rincian Output
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021



C. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN

Rencana, realisasi, dan capaian keluaran (output) Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

KODE	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output	OUTPUT			
		RENCANA	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4/3)X100%
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen				
4679.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	1	Layanan	100,00
4679.EAC	Layanan Umum	37	37	Layanan	100,00
4679.EAD	Layanan Sarana Internal	907	812	Unit	89,53

4679.EAE	Layanan Prasarana Internal	20.736	19.580	m ²	94,43
4679.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	2	Dokumen	100,00
4683.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100,00
4683.EAF	Layanan SDM	699.165	824.358	Orang	117,91

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai rencana, realisasi, dan capaian komponen dari masing-masing klasifikasi rincian output yang telah dilaksanakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai selama Tahun 2021.

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

Berisi penjelasan mengenai rencana, realisasi dan capaian rincian output rencana kebutuhan BMN dan pengelolaannya di unit eselon I.

Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

NO	KEGIATAN/KRO/RO	RENCANA	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4679.EAB				
1	001	1	1	Layanan	100,00%
	Jumlah	1	1		100,00%

2. Layanan Umum

Berisi penjelasan mengenai rencana, realisasi dan capaian rincian output operasional perkantoran, dukungan pimpinan dan keprotokoleran, kerumahtanggaan, dan keriasan.

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output
Layanan Umum
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

NO	KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4679.EAC				
1	001	12	12	Layanan	100,00%
2	002	12	12	Layanan	100,00%
3	003	12	12	Layanan	100,00%
4	004	1	1	Laporan	100,00%
	Jumlah	37	37		100,00%

3. Layanan Sarana Internal

Berisi penjelasan mengenai rencana, realisasi dan capaian rincian output pemeliharaan peralatan dan mesin serta peralatan fasilitas perkantoran.

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output
Layanan Sarana Internal
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

NO	KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4679.EAD				
1	002	691	691	Unit	100,00%
2	003	216	121	Unit	56,02%
	Jumlah	907	812		89,53%

4. Layanan Prasarana Internal

Berisi penjelasan mengenai rencana, realisasi dan capaian rincian output gedung/bangunan dan pemeliharaan gedung dan bangunan.

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output
Layanan Prasarana Internal
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

NO	KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4679.EAE				
1	001	1.860	704	M ²	37,85%
2	002	18.876	18.876	M ²	100,00%
	Jumlah	20.736	19.580		94,43%

5. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal

Berisi penjelasan mengenai rencana, realisasi dan capaian rincian output laporan keuangan unit eselon I dan laporan kinerja (LAKIN) unit eselon I.

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output
Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

NO	KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4679.EAN				
1	001	1	1	Laporan	100,00%
2	003	1	1	Laporan	100,00%
	Jumlah	2	2		100,00%

6. Kebijakan Ekonomi dan Keuangan

Berisi penjelasan mengenai rencana, realisasi dan capaian rincian output kajian akademis.

Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output
Kebijakan Ekonomi dan Keuangan
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

NO	KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4679.ABA				
1	001	2	2	Kajian	100,00%
	Jumlah	2	2		100,00%

7. Layanan SDM

Berisi penjelasan mengenai rencana, realisasi dan capaian rincian output gaji dan tunjangan pegawai, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, program dan materi pembelajaran, pembelajaran digital, pembelajaran klasikal, sertifikasi kompetensi, dan manajemen pengatahuan.

Tabel 3.9
Rencana dan Realisasi Klasifikasi Rincian Output
Layanan SDM
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

NO	KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4679.EAF				
1	001	83	83	Pegawai	100,00%
2	002	83	83	Pegawai	100,00%
3	004	83	83	Pegawai	100,00%
4	005	10	82	Program	820%
5	008	597.305	805.253	Jamlator	134,81%
6	009	8.522	17.629	Jamlator	206,86%
7	015	66	1.045	Peserta	1.583,33%
8	017	60	100	Aset Intelektual	166,67%
	Jumlah	606.212	824.358		135,99%

Rincian output dari setiap kegiatan ini ditujukan untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan operasional dan manajerial Pusdiklat Bea dan Cukai dan capaiannya sesuai bulan yang sudah berjalan dalam tahun anggaran.

**D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2020, dapat disampaikan sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 3.10
Target dan Capaian IKU Pusdiklat Bea dan Cukai
Tahun 2021**

No	Uraian IKU	Target 2021	(Januari - Desember)			
			Target s.d. Q4	Realisasi		Capaian
				Data Mentah	Realisasi	
1.	1a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	80%	80%	-	82,74%	103,42%
2.	2a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	84%	84%	52/52	100%	119,05%
3.	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,41 (skala 5)	4,41	-	4,63	104,99%
4.	4a-CP Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%	100%		100%	100%
5.	5a-CP Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%	70%	-	98,04%	140,06%
6.	5b-N Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja kementerian keuangan	0,7177%	0,7177%		0,8048%	112,13%
7.	6a-CP Persentase lulusan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	93%		94,78%	101,91%
8.	6b-N Indeks Persepsi Peserta Pelatihan	4,33 (skala 5)	4,33 (skala 5)	-	4,75	109,70%
9.	7a-CP Tingkat pemanfaatan <i>knowledge</i> pada platform KLC	100%	100%	-	118%	118%
10..	8a- CP Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi	80%	80%	-	100%	125%
11.	9a-CP Indeks pemenuhan standar Kualitas Pembelajaran	5 (skala 5)	5	-	5	100%
12.	10a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	100%	100%	-	92,86%	92,86%
13.	10b-CP Indeks Integritas	90,10	90,10		91,06	101,07%
14.	10c-N Persentase pelaksanaan kajian, <i>knowledge capture</i> dan aktualisasi pembelajaran	100%	100%	-	109,33%	109,33%
15.	10d-N Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	85%	85%	-	99,16%	116,66%

No	Uraian IKU	Target 2021	(Januari - Desember)			
			Target s.d. Q4	Realisasi		Capaian
				Data Mentah	Realisasi	
16.	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,50%	-	94,37%	98,82%
17.	12a-N Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%	100%	-	106,75%	106,75%

Penjelasan tujuan IKU:

1. **1.a-(CP)** tujuan IKU ini adalah mengukur keberhasilan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu.
2. **2.a-(CP)** tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para alumni dalam pelatihan yang diselenggarakan BPPK.
3. **3.a-(CP)** IKU ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau *stakeholders* terhadap layanan Kementerian Keuangan.
4. **4.a-(CP)** IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelatihan yang diselenggarakan yang dapat dilihat dari tingkat efektivitas pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik untuk menutup kesenjangan kompetensi teknis tertentu. Selain itu, IKU ini juga bermanfaat sebagai dasar *capacity building* bagi SDM perancang pelatihan maupun sebagai dasar perbaikan sistem dan mekanisme perancangan pelatihan di BPPK
5. **5.a-(CP)** IKU ini bertujuan untuk mengukur kesiapan BPPK dalam mendukung transformasi digital Kementerian Keuangan serta tingkat aksesibilitas dan cakupan pelatihan yang diselenggarakan BPPK.
6. **5.b-(N)** IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen Kementerian Keuangan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya melalui pendidikan dan pelatihan dan bermanfaat dalam memberikan *feedback* kepada BPPK dalam memperbaiki proses perencanaan kegiatan diklat.
7. **6.a-(CP)** IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas SDM yang kompeten dan bermanfaat dalam memberikan umpan balik kepada BPPK untuk memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini.

8. **6.b-(N)** IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat berdasarkan persepsi peserta diklat.
9. **7.a-(CP)** IKU ini bertujuan mengukur tingkat pemanfaatan materi *knowledge document*/materi pembelajaran di bidang Keuangan Negara pada KLC.
10. **8.a-(CP)** IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi diselenggarakan sesuai janji layanan dan ketentuan yang berlaku.
11. **9.a-(CP)** IKU ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandarisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
12. **10.a-(CP)** IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah pejabat yang telah sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan penyelesaian *re-assessment center* bagi pejabat yang nilai *assessment center*-nya telah kadaluarsa pada tahun 2021.
13. **10.b-(CP)** IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kementerian Keuangan (responden eksternal)
14. **10.c-(N)** IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi *learning organization* dalam bentuk penyusunan kajian, melakukan *knowledge capture*, dan melakukan aktualisasi pembelajaran dari setiap pegawai di lingkungan BPPK
15. **10.d-(N)** IKU ini bertujuan mengukur komitmen organisasi dalam mengembangkan kompetensi pegawai.
16. **11.a-(CP)** IKU ini bertujuan untuk mengetahui kinerja satker K/L dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal.
17. **12.a-(N)** IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemutakhiran basis data penyelenggaraan diklat di Pusdiklat

E. ANALISIS KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN RENSTRA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pelatihan (termasuk lokakarya/workshop/seminar/IHT) di bidang kepabeanan dan cukai. Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan di Pusdiklat Bea dan Cukai sebanyak 3 pelatihan klasikal, 52 pelatihan jarak jauh, 76 *e-learning* dan 26 *open acces (e-learning dan microlearning)* dan 5 seminar/*open class*. Selain itu terdapat pelatihan yang diselenggarakan di Balai

Diklat Keuangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pelatihan, dan yang diselenggarakan di kantor unit DJBC (kerjasama pelatihan) sebanyak 13 (tiga belas) pelatihan/IHT.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, Pusdiklat Bea dan Cukai juga telah menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan (SAK) sebanyak tiga kali penyelenggaraan, yang ujiannya dilaksanakan pada bulan Maret bertempat di 12 lokasi ujian, bulan Agustus 2021 bertempat di 9 lokasi ujian, dan bulan Oktober bertempat di 10 lokasi ujian 2021 di seluruh Indonesia. Jumlah peserta ujian terdaftar sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) orang, jumlah peserta hadir ujian sebanyak 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) orang, dan jumlah peserta yang lulus ujian sebanyak 88 orang (9,41% dari total peserta yang mengikuti ujian). Mengingat kondisi pandemi covid-19, pelaksanaan ujian SAK tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja (Lakin) Pusdiklat Bea dan Cukai Triwulan IV tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pusdiklat Bea dan Cukai dalam mewujudkan visi dan misinya sampai dengan Triwulan IV tahun 2021. Sebagian besar kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 telah dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang memperoleh penilaian sangat baik dari peserta pelatihan. Namun demikian, sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 masih terdapat beberapa kegiatan yang diwujudkan dalam IKU yang belum tercapai secara optimal sehingga memerlukan perhatian lebih pada waktu mendatang untuk memenuhinya.

B. SARAN

Meskipun sebagian besar pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi selama Triwulan IV tahun 2021 yang mempengaruhi ketidaktercapaian beberapa IKU Pusdiklat Bea dan Cukai sampai dengan triwulan ini. Kendala yang terjadi seperti realisasi peserta pelatihan yang berkurang dari rencana semula dan penyerapan anggaran yang belum optimal. Namun, peluang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik dari segi layanan kediklatan, fasilitas kediklatan maupun tingkat kehadiran dan lulusan peserta pelatihan di masa mendatang masih sangat besar, sejalan dengan semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi Pusdiklat Bea dan Cukai dalam mewujudkan visi dan misinya. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengajar maupun tenaga layanan kediklatan, perbaikan dan penggantian serta penambahan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pusdiklat Bea dan Cukai demi untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada *user* khususnya DJBC.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-71/PP.5/2022

Yth : Sekretaris Badan
Dari : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Capaian IKU Kemenkeu Two Desember 2021
Tanggal : 10 Januari 2022

Sehubungan dengan telah berakhirnya bulan Desember 2021, berikut kami sampaikan laporan capaian IKU Kemenkeu Two Pusdiklat Bea dan Cukai untuk Tahun Anggaran 2021:

No	Uraian IKU	Target 2021	Realisasi s.d. Desember	Capaian (Realisasi /target)
1.	1a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	80%	73,14%	91,43%
2.	2a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	84%	100%	119,05%
3.	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,41	4,63	104,99%
4.	4a-CP Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%	100%	100%
5.	5a-CP Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%	98,04%	140,06%
6.	5b-N Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan	0,7177%	0,8048%	112,13%
7.	6a-CP Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93%	94,78%	101,91%
8.	6b-N Indeks Persepsi Peserta Pelatihan	4,33	4,75	109,7%
9.	7a-CP Tingkat Pemanfaatan Knowledge pada Platform KLC	100%	118%	118%
10.	8a-CP Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi	80%	100%	125%
11.	9a-CP Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	5	5	100%
12.	10a-CP Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	100%	92,86%	92,86%

No	Uraian IKU	Target 2021	Realisasi s.d. Desember	Capaian (Realisasi /target)
13.	10b-CP Indeks Integritas	90,10	91,06	101,07%
14.	10c-N Persentase Pelaksanaan kajian, knowledge capture, dan aktualisasi pembelajaran	100%	109,33%	109,33%
15.	10d-N Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	85%	99,16%	116,66%
16.	11a- CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	94,37%	98,82%
17.	12a- N Persentase Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik	100%	106,75%	106,75%

Daftar lengkap beserta perhitungan capaian IKU terlampir. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Harry Mulya





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-142/PP.5/2022

Yth : Sekretaris Badan
Dari : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Sifat : Segera
Hal : Revisi Capaian IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya
Tanggal : 19 Januari 2022

Sehubungan dengan capaian IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya, bersama ini kami sampaikan usulan revisi capaian IKU tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa ada sebagian karakteristik usulan pelatihan dari DJBC yang mengharuskan pegawai untuk mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas sesuai dengan materi pembelajaran (DIK DUK) dikarenakan sifat pekerjaan yang berkaitan dengan hukum dimana harus paham terhadap ilmu dan pengetahuan sebelum mengerjakan tugas. Jadi dalam hal ini ada sebagian karakter usulan pelatihan DJBC yang berbeda dengan Unit Eselon I lainnya di lingkungan kementerian keuangan;
2. Berdasarkan data epaspem diketahui bahwa jumlah alumni pelatihan yang mengikuti pelatihan dan mengerjakan tugas sesuai materi pembelajaran sesudah pelatihan (DIKDUK) sebanyak 142 alumni (65% dari 218 alumni) dan alumni pelatihan yang mengerjakan tugas sesuai materi pembelajaran sebelum dan sesudah pelatihan (DUKDIKDUK) sebanyak 76 alumni (35% dari 218 alumni). Rendahnya jumlah alumni pelatihan DUKDIKDUK ini mengakibatkan nilai komponen C menjadi rendah;
3. Mengingat belum adanya klusterisasi pengukuran terhadap alumni pelatihan berdasarkan kluster DIKDUK dan DUKDIKDUK, jadi sebaiknya kami menerapkan DUKDIKDUK sehingga jumlah subyek level 2 berubah dengan rincian berikut.
 - a. Subyek Level 2

No.	Nama Pelatihan	Subyek level 2	
		Semula	Menjadi
1.	PJJ Manifes tahun 2020	28	20
2.	PJJ PBIL Tahun 2020	111	29
3.	PJJ Manifes tahun 2021	30	21
4.	PJJ PBIL Tahun 2021	49	6
	Total	218	76

b. Perhitungan IKU

No	Nama Pelatihan	Alumni Pelatihan				Nilai IKU			
		Lulus Evaluasi Level 4	Subyek Level 4	Subyek Level 3	Subyek Level 2	Komponen A (50%)	Komponen B (30%)	Komponen C (20%)	Total
1	Manifes 2020	12	17	20	20	35,29%	18,00%	12,00%	65,29%
2	PBIL 2020	17	17	29	29	50,00%	17,59%	11,72%	79,31%
3	Manifes 2021	21	21	21	21	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
4	PBIL 2021	6	6	6	6	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
	Realisasi	56	61	76	76	45,90%	22,11%	14,74%	82,74%
	Target								80,00%
	Capaian								103,42%

4. Berdasarkan perhitungan pada poin 3, dapat kami sampaikan revisi LCK IKU tersebut sebagai berikut:

Nama IKU	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target		80%		80%	80%
Realisasi		72,23%		82,74%	82,74%
Capaian		90,29 %		103,42%	103,42%

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Harry Mulya



Lampiran Laporan Penyelenggaraan E-Learning

No	Nama <i>E-Learning</i>	Jumlah Peserta	Rating	Tanggapan	Rekomendasi Perbaikan
1	<i>E-Learning</i> Pengantar Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Angkatan I	118	4.58	Materi agar diperbaharui lagi dan kendalam saat menggunakan KLC2	Melakukan pembahasan dengan tim penyusun materi dan melakukan pembaharuan serta melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK
2	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan I	270	4.75	Kendala saat menggunakan KLC2 khususnya saat pelaksanaan kuis	Melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK
3	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanaan Angkatan I	642	4.75	Soal kuis agar dicek kembali supaya tidak ada yang tertukar	Melakukan pengecekan dan disampaikan kepada penyusun kuis dan tim <i>Knowledge Management</i>
4	<i>E-Learning</i> Pemeriksaan Barang Impor Dasar Angkatan I	1085	4.69	Meningkatkan Kembali server KLC2 agar lebih mudah diakses dan sebaiknya seluruh materi video dapat diunduh	Melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK dan melakukan pembahasan dengan tim penyusun materi dan tim Knowledge Management
5	<i>E-Learning</i> Pengantar Cukai Lanjutan	60	4.83	Setiap materi dibuatkan video agar lebih mudah dipahami	Melakukan pembahasan dengan tim penyusun materi dan tim Knowledge Management
6	<i>E-Learning</i> Pra Kesamaptaan	104	4.68	-	-
7	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM	8	4.66	Menyediakan bahan ajar selain video seperti .pdf dan .ppt yang bisa diunduh	Menyampaikan kepada tim penyusun materi dan kurikulum
8	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan II	1647	4.77	Kendala saat menggunakan KLC2 khususnya saat pelaksanaan kuis	Melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK
9	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai Angkatan I	635	4.81	Sebaiknya seluruh materi disediakan juga dalam bentuk .pdf dan .ppt serta dapat diunduh	Menyampaikan kepada tim penyusun materi dan kurikulum
10	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan III	1766	4.77	Kendala saat menggunakan KLC2 khususnya saat pelaksanaan kuis	Melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK
11	<i>E-Learning</i> Tugas dan Fungsi DJBC	160	4.53	-	-
12	<i>E-Learning</i> Pelaporan Audit Angkatan I	45	4.66	Kendala saat menggunakan KLC2 seperti <i>lost connection</i> dan <i>load jaringan</i> terasa berat dan lama	Melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK

13	<i>E-Learning</i> Pengantar Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai Angkatan I	58	4.83	Agar diadakan diklat lanjutan berupa Pelatihan Jarak Jauh supaya pemahaman lebih komprehensif	Menyampaikan kepada tim program dan kurikulum
14	<i>E-Learning</i> Budaya Organisasi DJBC	134	4.60	Sebaiknya disajikan video terbaru dengan latar kekinian	Membahas dengan penyusun materi dan tim <i>Knowledge Management</i> untuk melakukan pembaruan video
15	<i>E-Learning</i> Pelaporan Audit Angkatan II		4.64	-	-
16	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang untuk Pegawai DJBC Angkatan I	45	4.64	Akses KLC2 terkadang masih error terutama bagi peserta yang berada di daerah dengan koneksi internet kurang baik	Melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK
17	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan IV	1634	4.65	-	-
18	<i>E-Learning E-Commerce</i> Angkatan I	1193	4.57	Sebaiknya materi ditambah dengan modus <i>fraud</i> yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau celah risiko	Menyampaikan kepada tim penyusun materi dan kurikulum
19	<i>E-Learning E-Commerce</i> Angkatan II	1304	4.62	-	-
20	<i>E-Learning E-Commerce</i> Angkatan III	1152	4.50	-	-
21	<i>E-Learning</i> Pengantar <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	223	4.69	Agar disediakan menu untuk mengajukan pertanyaan jika peserta kurang jelas atas suatu materi	Membahas dengan tim Knowledge Management dan komunikasi dengan bagian TIK BPPK
22	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan V	1710	4.74	-	-
23	<i>E-Learning</i> Pemeriksaan Barang Impor Dasar Angkatan II	196	4.41	Materi yang disajikan belum memberikan gambaran utuh terhadap keseluruhan proses pemeriksaan barang	Membahas dengan tim penyusun materi dan kurikulum
24	<i>E-Learning</i> Pengantar Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai Angkatan II	58	4.78	-	-
25	<i>E-Learning E-Commerce</i> Angkatan IV	1513	4.68	-	-
26	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Pegawai DJBC Angkatan I	7	5.00	-	-
27	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Non Pegawai DJBC Angkatan I	1	5.00	-	-
28	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan I	6	4.00	-	-

29	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Non Pegawai DJBC Angkatan I	1/3	4.67	-	-
30	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan untuk Non Pegawai DJBC Angkatan I	3	4.67	-	-
31	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai untuk Non Pegawai DJBC Angkatan I	9	4.63	-	-
32	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID 19 Angkatan I	4	5.00	-	-
33	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan I	12	4.43	-	-
34	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan I	13	5.00	-	-
35	<i>E-Learning</i> Ekspor Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan I	7	4.94	-	-
36	<i>E-Learning</i> Perdagangan Internasional Angkatan I	24	4.83	-	-
37	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan I	18	4.42	Kendala saat akses KLC2	Melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK
38	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Pegawai DJBC Angkatan II	4	4.88	-	-
39	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan II	18	4.71	-	-
40	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Non Pegawai DJBC Angkatan II	1	4.67	-	-
41	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan untuk Non Pegawai DJBC Angkatan II	3	4.42	-	-
42	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai untuk Non Pegawai DJBC Angkatan I	2	4.17	-	-
43	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID 19 Angkatan II	5	4.75	-	-

44	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan II	11	4.82	-	-
45	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan II	13	4.83	Agar KLC disediakan aplikasi online di smartphone seperti KLC2	Melakukan komunikasi dengan bagian TIK BPPK
46	<i>E-Learning</i> Ekspor Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan II	9	4.88	-	-
47	<i>E-Learning</i> Perdagangan Internasional Angkatan II	1	5.00	-	-
48	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan II	4	4.83	-	-
49	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Pegawai Non DJBC Angkatan I	11	4.71	-	-
50	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Pegawai DJBC Angkatan III	3	4.96	-	-
51	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Non Pegawai DJBC Angkatan II	2	5.00	-	-
52	E-Learning Fasilitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan III	1	4.44	-	-
53	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Non Pegawai DJBC Angkatan III	1	4.50	-	-
54	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan untuk Non Pegawai DJBC Angkatan III	4	4.25	-	-
55	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai untuk Non Pegawai DJBC Angkatan III	1	5.00	-	-
56	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID 19 Angkatan III	1	4.58	-	-
57	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan III	7	4.76	-	-
58	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan III	8	5.00	-	-
59	<i>E-Learning</i> Ekspor Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan III	9	4.78	-	-

60	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan III	16	4.61	Disediakan materi dalam format .pdf dan .ppt secara lengkap untuk seluruh materi dan dapat diunduh	Dibahas dengan tim penyusun materi dan tim <i>Knowledge Management</i>
61	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Pegawai Non DJBC Angkatan II	4	4.56	-	-
62	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Non Pegawai DJBC Angkatan III	1	4.00	-	-
63	E-Learning Fasiitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan IV	2	4.50	-	-
64	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Non Pegawai DJBC Angkatan IV	2	5.00	-	-
65	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan untuk Non Pegawai DJBC Angkatan IV	3	4.39	-	-
66	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai untuk Non Pegawai DJBC Angkatan IV	2	4.50	-	-
67	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID 19 Angkatan IV	3	4.67	-	-
68	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan IV	5	4.83	-	-
69	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan IV	2	5.00	-	-
70	<i>E-Learning</i> Ekspor Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan IV	27	4.89	-	-
71	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan IV	6	4.90	-	-
72	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Pegawai Non DJBC Angkatan III	6	4.00	-	-
73	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Pegawai DJBC Angkatan IV	2	5.00	-	-
74	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Non Pegawai DJBC Angkatan IV	1	5.00	-	-
75	E-Learning Fasiitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan V	1	5.00	-	-

76	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Non Pegawai DJBC Angkatan V	1	5.00	-	-
77	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan untuk Non Pegawai DJBC Angkatan V	3	4.33	-	-
78	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai untuk Non Pegawai DJBC Angkatan V	2	4.00	-	-
79	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan V	5	4.80	-	-
80	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan V	5	4.83	-	-
81	<i>E-Learning</i> Ekspor Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan V	9	4.41	-	-
82	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Pegawai Non DJBC Angkatan IV	11	4.50	-	-
83	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Pegawai DJBC Angkatan V	1	4.92	-	-
84	E-Learning Fasiitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan VI	1	5.00	-	-
85	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan untuk Non Pegawai DJBC Angkatan VI	1	4.00	Materi terlalu padat	Membahas kembali dengan tim penyusun materi dan kurikulum
86	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai untuk Non Pegawai DJBC Angkatan VI	1	4.00	-	-
87	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID 19 Angkatan V	1	5.00	-	-
88	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan VI	6	5.00	-	-
89	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan VI	3	5.00	-	-
90	<i>E-Learning</i> Ekspor Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan VI	4	4.67	-	-
91	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan V	6	4.81	-	-

92	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Pegawai Non DJBC Angkatan V	9			
93	<i>E-Learning</i> E-Commerce untuk Pegawai Kementerian Keuangan Angkatan I	451	3.71	Jeda transisi animasinya agar dipercepat	Membahas dengan tim Knowledge Management
94	<i>E-Learning</i> E-Commerce untuk Pegawai Kementerian Keuangan Angkatan II	121	4.45	-	-
95	<i>E-Learning</i> Pelaporan Audit V	49	4.61	-	-
96	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang untuk Pegawai DJBC IV	177	4.61	-	-
97	<i>E-learning</i> Pengenalan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) I	259	4.72	-	-
98	<i>E-learning</i> Nilai Pabean VIII	1412	4.79	-	-
99	<i>E-learning</i> Pemeriksaan Barang Impor Dasar V	231	4.64	-	-
100	<i>E-learning</i> Identifikasi dan Klasifikasi Barang Dasar Angkatan IV	174	4.70	-	-
101	<i>E-Learning</i> Pengenalan Tempat Penimbunan Berikat	622	4.80	-	-
102	<i>E-Learning</i> E-Commerce untuk Pegawai DJBC VII	1342	4.73	-	-
103	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan VII	1	5.00	-	-
104	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Non Pegawai DJBC Angkatan VII	2	4.50	-	-
105	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Pegawai DJBC Angkatan VII	2	5.00	-	-
106	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Non Pegawai DJBC Angkatan VII	1	4.33	Kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta, bahan ajar mudah dipahami, kesesuaian metode pembelajaran dengan materi, menu fasilitas <i>e-learning</i> mudah digunakan	Membahas kembali dengan tim penyusun materi dan kurikulum
107	<i>E-Learning</i> UU Kepabeanaan untuk Pegawai Non DJBC Angkatan VII	2	4.61	-	-

108	<i>E-Learning</i> UU Cukai untuk Pegawai Non DJBC Angkatan VII	1	5.00	-	-
109	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Angkatan VII	1	5.00	-	-
110	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan VII	2	4.75	-	-
111	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan VII	3	4.50	-	-
112	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan VII	7	4.62	-	-
113	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Pegawai Non DJBC Angkatan VI	2	5.00	-	-
114	<i>E-Learning E-Commerce</i> untuk Pegawai Kemenkeu Angkatan III	116	4.68	-	-
115	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM untuk Pegawai Non DJBC Angkatan VIII	1	4.33	Kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta, menu fasilitas mudah digunakan	Membahas kembali dengan tim penyusun materi dan kurikulum
116	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat untuk Pegawai Non DJBC Angkatan VIII	1	4.33	-	-
117	<i>E-Learning</i> UU Kepabeanan untuk Pegawai Non DJBC Angkatan VIII	4	4.61	Kesesuaian metode pembelajaran dengan materi, fasilitas <i>e-learning</i> dapat diakses setiap saat	Membahas kembali dengan tim penyusun materi dan kurikulum
118	<i>E-Learning</i> UU Cukai untuk Pegawai Non DJBC Angkatan VIII	1	5.00	-	-
119	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Angkatan VIII	1	5.00	-	-
120	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan VIII	3	4.83	-	-
121	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan VIII	3	4.72	-	-
122	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan VIII	5	4.73	-	-

123	<i>E-Learning</i> Perdagangan Internasional Angkatan IV	11	4.76	-	-
124	<i>E-Learning</i> Fasilitas Pembebasan	263	4.76	-	-
125	<i>E-Learning</i> Pelaporan Audit Angkatan VI	47	4.80	-	-
126	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan IX	1290	4.81	-	-
127	<i>E-Learning</i> Pemeriksaan Barang Impor Dasar Angkatan VI	212	4.68	-	-
128	<i>E-Learning</i> Identifikasi dan Klasifikasi Barang Dasar Angkatan V	193	4.68	Pada MP Teknik Identifikasi dan Klasifikasi Barang perlu contoh kasus dan sesi sinkronus agar ditambah 1 JP	Membahas kembali dengan tim penyusun materi dan kurikulum
129	<i>E-Learning</i> Undang- Undang Kepabeanan Angkatan III	11	4.67	Beberapa kuis dilakukan sebelum materi disampaikan sehingga tujuan kuis tidak tercapai jika dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap peserta	Membahas kembali dengan tim penyusun materi dan kurikulum
130	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat	608	4.72	-	-
131	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan di Kawasan Khusus	428	4.77	-	-
132	<i>E-Learning</i> Pengenalan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Angkatan II	254	4.75	-	-
133	<i>E-Learning E-Commerce</i> untuk Pegawai DJBC Angkatan VIII	1505	4.70	Jumlah <i>retake</i> kuis agar ditambah	Membahas kembali dengan tim penyusun materi dan kurikulum
134	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai Angkatan III	12	4.57	-	-
135	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Pegawai DJBC Angkatan VIII	16	4.80	-	-
136	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Non Pegawai DJBC Angkatan VIII	1	5.00	-	-
137	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Angkatan IX	1	5.00	-	-
138	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan X	1	5.00	-	-

139	<i>E-Learning</i> DJBC: Narkotika dan Pengawasannya Angkatan X	6	4.61	-	-
140	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan X	3	5.00	-	-
141	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan VII	29	4.81	-	-
142	<i>E-Learning</i> Perdagangan Internasional Angkatan VI	23	4.83	-	-
143	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan VIII	1	5.00	-	-
144	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan untuk Non Pegawai DJBC Angkatan IX	1	4.83	-	-
145	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Angkatan VIII	1	5.00	-	-
146	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan IX	4	4.33	-	-
147	<i>E-learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan IX	3	5.00	-	-
148	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan IX	6	5.00	-	-
149	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan VI	3	4.94	-	-
150	<i>E-learning</i> Perdagangan Internasional Angkatan V	13	4.68	-	-
151	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Pegawai Non DJBC Angkatan V	4	4.63	-	-
152	<i>E-Learning E-Commerce</i> untuk Pegawai Kemenkeu Angkatan III	155	4.61	-	-
153	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Pegawai Non DJBC Angkatan VI	9	4.54	-	-
154	<i>E-Learning E-Commerce</i> untuk Pegawai Kemenkeu Angkatan IV	101	4.72	-	-

155	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Pegawai DJBC Angkatan IX	1	5.00	-	-
156	<i>E-Learning</i> Fasilitas KITE IKM Non Pegawai DJBC Angkatan VII	6	5.00	-	-
157	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Pegawai DJBC Angkatan IX	8	4.23	-	-
158	<i>E-Learning</i> Fasilitas Gudang Berikat Non Pegawai DJBC Angkatan VIII	6	5.00	-	-
159	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan untuk Non Pegawai DJBC Angkatan X	10	4.50	-	-
160	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Cukai untuk Non Pegawai DJBC Angkatan IX	6	4.97	-	-
161	<i>E-Learning</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Angkatan X	9	4.69	-	-
162	<i>E-Learning</i> Impor Barang Kiriman Angkatan XI	15	4.84	-	-
163	<i>E-Learning</i> DJBC : Narkotika dan Pengawasannya Angkatan XI	24	4.83	-	-
164	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan XI	21	4.79	-	-
165	<i>E-Learning</i> Prosedur Impor Umum Angkatan VIII	34	4.72	-	-
166	<i>E-Learning</i> Perdagangan Internasional Angkatan VII	23	4.88	-	-
167	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean untuk Non Pegawai DJBC Angkatan VII	7	4.76	-	-
168	<i>E-Learning E-Commerce</i> untuk Pegawai Kemenkeu Angkatan V	64	4.65	-	-
169	<i>E-Learning</i> Pengantar Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Angkata II	124	4.67		
170	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan X	1902	4.77		
171	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan XI	710	4.81		

172	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang untuk Pegawai DJBC Angkatan V	168	4.69		
173	<i>E-Learning</i> Identifikasi dan Klasifikasi Barang Dasar Angkatan VI	160	4.67		
174	<i>E-Learning</i> Juru Sita Kepabeanan dan Cukai Dasar Angkatan I	30	4.73		
175	<i>E-Learning E-Commerce</i> untuk Pegawai DJBC Angkatan V	1417	4.53		
176	<i>E-Learning E-Commerce</i> untuk Pegawai DJBC Angkatan VI	1243	4.66		
177	<i>E-Learning</i> Tugas dan Fungsi DJBC Angkatan II	86	4.71		
178	<i>E-Learning</i> Pemeriksaan Barang Impor Dasar Angkatan IV	220	4.62		
179	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan VII	1427	4.79		
180	<i>E-Learning</i> Identifikasi dan Klasifikasi Barang Dasar Angkatan III	197	4.75		
181	<i>E-Learning</i> Budaya Organisasi DJBC Angkatan II	87	4.72		
182	<i>E-Learning</i> Identifikasi dan Klasifikasi Barang Dasar Angkatan II	192	4.68		
183	<i>E-Learning</i> Pelaporan Audit Angkatan IV	45	4.70		
184	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang untuk Pegawai DJBC Angkatan III	200	4.59		
185	<i>E-Learning</i> Undang-Undang Kepabeanan Angkatan II	66	4.60		
186	<i>E-Learning</i> Pemeriksaan Barang Impor Dasar Angkatan III	223	4.61		
187	<i>E-Learning</i> Pelaporan Audit Angkatan III	44	4.61		
188	<i>E-Learning</i> Nilai Pabean Angkatan VI	1011	4.78		
189	<i>E-Learning</i> Kawasan Berikat Mandiri Angkatan I	703	4.75		

190	<i>E-Learning</i> Identifikasi dan Klasifikasi Barang Dasar Angkatan I	187	4.72		
191	<i>E-Learning</i> Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan II	172	4.72		

Lampiran Laporan Penyelenggaraan *Microlearning*

No	Nama <i>Microlearning</i>	Jumlah Peserta	Rating	Tanggapan	Rekomendasi Perbaikan
1	<i>Microlearning</i> Ketentuan Umum Impor Barang Kiriman Angkatan I	7	4.00	-	-
2	<i>Microlearning</i> Mekanisme Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD 1.500 Angkatan I	4	4.79	-	-
3	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman dengan PIBK Angkatan I	6	4.67	-	-
4	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan I	4	4.50	-	-
5	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan I	6	4.83	-	-
6	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan I	15	4.67	-	-
7	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan I	24	4.71	-	-
8	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan I	28	4.63	-	-
9	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan I	26	4.54	-	-
10	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan I	23	4.83	-	-
11	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepalabuhanan Angkatan I	35	5.00	-	-
12	<i>Microlearning</i> Ketentuan Umum Impor Barang Kiriman Angkatan II	13	4.80	-	-
13	<i>Microlearning</i> Mekanisme Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD 1.500 Angkatan II	12	4.79	-	-

14	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman dengan PIBK Angkatan II	18	4.76	-	-
15	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan II	10	4.80	-	-
16	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan II	11	4.57	-	-
17	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan II	22	4.66	-	-
18	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan II	33	4.71	-	-
19	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 Angkatan I	7	4.44	-	-
20	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan II	32	4.83	-	-
21	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan II	30	4.71	-	-
22	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan II	17	4.86	-	-
23	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepalabuhanan Angkatan II	14	4.93	-	-
24	<i>Microlearning</i> Ketentuan Umum Impor Barang Kiriman Angkatan III	8	4.98	-	-
25	<i>Microlearning</i> Mekanisme Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD 1.500 Angkatan III	8	4.75	-	-
26	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman dengan PIBK Angkatan III	7	4.86	-	-
27	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan III	1	5.00	-	-
28	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan III	5	4.92	-	-

29	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan III	15	4.92	-	-
30	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan III	11	4.83	-	-
31	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 Angkatan II	2	5.00	-	-
32	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan III	18	4.99	-	-
33	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan III	14	4.68	-	-
34	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan III	15	4.82	-	-
35	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepalabuhanan Angkatan III	10	4.73	-	-
36	<i>Microlearning</i> Ketentuan Umum Impor Barang Kiriman Angkatan IV	4	4.92	-	-
37	<i>Microlearning</i> Mekanisme Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD 1.500 Angkatan IV	6	4.86	-	-
38	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman dengan PIBK Angkatan IV	4	4.86	-	-
39	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan IV	10	5.00	-	-
40	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan IV	10	4.87	-	-
41	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan IV	8	4.81	-	-
42	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan IV	11	4.85	-	-

43	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 Angkatan III	11	5.00	-	-
44	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan IV	22	4.92	-	-
45	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan IV	10	4.75	-	-
46	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan IV	7	4.79	-	-
47	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepalabuhanan Angkatan IV	7	5.00	-	-
48	<i>Microlearning</i> Ketentuan Umum Impor Barang Kiriman Angkatan V	8	4.60	-	-
49	<i>Microlearning</i> Mekanisme Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD 1.500 Angkatan V	9	4.86	-	-
50	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman dengan PIBK Angkatan V	6	4.80	-	-
51	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan V	4	4.50	-	-
52	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan V	6	4.50	-	-
53	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan V	10	4.46	-	-
54	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan V	14	4.72	-	-
55	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 Angkatan IV	6	4.97	-	-

56	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan V	20	4.72	-	-
57	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan V	21	4.70	-	-
58	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan V	12	4.77	-	-
59	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepalabuhanan Angkatan V	10	4.88	-	-
60	<i>Microlearning</i> Ketentuan Umum Impor Barang Kiriman Angkatan VI	3	5.00	-	-
61	<i>Microlearning</i> Mekanisme Barang Kiriman dengan PIBK Angkatan VI	2	5.00	-	-
62	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan VI	5	4.67	-	-
63	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan VI	6	4.33	-	-
64	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan VI	2	5.00	-	-
65	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 Angkatan V	3	4.50	-	-
66	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan VI	14	4.75	-	-
67	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan VI	5	4.73	-	-
68	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan VI	4	4.75	-	-
69	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepalabuhanan Angkatan VI	2	4.88	-	-
70	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Angkatan VII	4	5.00	-	-

71	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD. 1.500 Angkatan VII	4	5.00	-	-
72	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan VII	1	5.00	-	-
73	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan VII	2	4.50	-	-
74	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan VII	5	5.00	-	-
75	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan VII	9	5.00	-	-
76	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Angkatan VIII	3	5.00	-	-
77	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD. 1.500 Angkatan VIII	1	5.00	-	-
78	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman dengan Dokumen PIBK Angkatan VIII	2	4.92	-	-
79	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan VIII	3	5.00	-	-
80	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan VIII	1	5.00	-	-
81	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan VII	6	4.69	-	-
82	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan VIII	10	4.90	-	-
83	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepelabuhanan Angkatan VIII	17	4.76	-	-
84	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan	1	5.00	-	-

	Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Angkatan VI					
85	<i>Microlearning Dual Used</i> Bahan Kimia Angkatan IX	1	4.83	-		-
86	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Angkatan IX	1	5.00	-		-
87	<i>Microlearning</i> Mekanisme Ketentuan Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD 1.500 Angkatan VI	1	5.00	-		-
88	<i>Microlearning</i> Mekanisme Ketentuan Impor Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan VII	1	4.00	-		-
89	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan IX	4	5.00	-		-
90	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang Yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan IX	5	4.87	-		-
91	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan IX	6	5.00	-		-
92	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan VII	13	4.81	-		-
93	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan VII	13	4,59	-		-
94	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepelabuhanan Angkatan IX	21	4.73	-		-
95	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Angkatan VII	1	5.00	-		-
96	<i>Microlearning Dual Used</i> Bahan Kimia Angkatan X	3	4.56	-		-

97	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan X	2	4.50	-	-
98	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan X	7	4.95	-	-
99	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan X	8	4.71	-	-
100	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan VIII	10	4.80	-	-
101	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan VIII	7	5.00	-	-
102	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepelabuhanan Angkatan X	6	5.00	-	-
103	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Angkatan VIII	7	4.86	-	-
104	<i>Microlearning</i> Dual Used Bahan Kimia Angkatan XI	8	4.88	-	-
105	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Angkatan X	15	4.66	-	-
106	<i>Microlearning</i> Mekanisme Ketentuan Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD 1.500 Angkatan VIII	9	4.85	-	-
107	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan VIII	8	4.79	-	-
108	<i>Microlearning</i> Mekanisme Ketentuan Impor Barang Kiriman dengan Dokumen PIBK Angkatan VIII	5	4.80	-	-
109	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan XI	11	4.79	-	-

110	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan XI	4	4.92	-	-
111	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang Angkatan XI	4	4.50	-	-
112	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan IX	8	4.79	-	-
113	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan IX	4	4.75	-	-
114	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepelabuhanan Angkatan XI	8	5.00	-	-
115	<i>Microlearning</i> Percepatan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk Barang dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Angkatan IX	2	4.50	-	-
116	<i>Microlearning Dual Used</i> Bahan Kimia Angkatan XII	8	4.88	-	-
117	<i>Microlearning</i> Ketentuan Impor Barang Kiriman Angkatan XI	8	4.77	-	-
118	<i>Microlearning</i> Mekanisme Ketentuan Impor Barang Kiriman Bernilai s.d. FOB USD 1.500 Angkatan IX	5	4.60	-	-
119	<i>Microlearning</i> Mekanisme Ketentuan Impor Barang Kiriman Kategori Khusus Angkatan VIII	4	4.54	-	-
120	<i>Microlearning</i> Mekanisme Ketentuan Impor Barang Kiriman dengan Dokumen PIBK Angkatan IX	6	4.72	-	-
121	<i>Microlearning</i> Ekspor Barang Bawaan Penumpang di Terminal Keberangkatan Luar Daerah Pabean Angkatan XII	10	4.60	-	-
122	<i>Microlearning</i> Impor Barang Bawaan Penumpang yang Datang dari Luar Daerah Pabean Angkatan XII	4	5.00	-	-

123	<i>Microlearning</i> Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bawaan Penumpang	2	5.00	-	-
124	<i>Microlearning</i> Proses Bisnis Perdagangan Internasional Angkatan X	14	4.50	-	-
125	<i>Microlearning</i> Pengenalan Dokumen Perdagangan Internasional Angkatan X	6	4.72	-	-
126	<i>Microlearning</i> Pelayaran dan Kepelabuhanan Angkatan XII	3	5.00	-	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

LAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN
PERIODE BULAN MARET 2021

A. Dasar Penyelenggaraan.

Pengumuman Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Tentang Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Bulan Maret 2021 Nomor Peng-36/PP.5/2021 tanggal 28 Januari 2021.

B. Tahap Registrasi dan verifikasi berkas.

Tahapan pertama dalam ujian sertifikasi ahli kepabeanan yaitu tahap pendaftaran dan verifikasi berkas. Pendaftaran sepenuhnya dilaksanakan secara online dengan mengunggah berkas dan persyaratan dari tanggal 28 Januari sampai dengan 11 Februari 2021. Dari dokumen pendaftaran yang masuk, dilakukan verifikasi berkas dengan data sebaran peserta sebagai berikut:

No.	Kota Lokasi Ujian	Peserta Mendaftar	Lulus Verifikasi Berkas
1.	Balikpapan	8	7
2.	Bandung	22	20
3.	Batam	31	25
4.	Jakarta	262	250
5.	Makassar	6	6
6.	Malang	3	3
7.	Manado	1	1
8.	Medan	25	25
9.	Palembang	7	7
10.	Semarang	32	32
11.	Surabaya	75	68
12.	Yogyakarta	7	4
	Total	479	448

Dari peserta yang lulus verifikasi administrasi berkas, kemudian diwajibkan melakukan pembayaran PNPB berdasarkan tarif yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 sejumlah Rp,1.000.000,- Dari 448 peserta yang lulus, sampai dengan batas waktu pembayaran biaya ujian, sebanyak 416 peserta telah melakukan pembayaran dan dinyatakan sah mengikuti ujian.

C. Penyelenggaraan Ujian

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Maret diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 dengan lokasi dan sebaran peserta sebagai berikut:

No.	Kota Lokasi Ujian	Peserta Terdaftar	Peserta Hadir
1.	Balikpapan	7	7
2.	Bandung	15	15
3.	Batam	24	23
4.	Jakarta	238	219
5.	Makassar	6	6
6.	Malang	2	2
7.	Manado	1	1
8.	Medan	25	25
9.	Palembang	5	5
10.	Semarang	26	25
11.	Surabaya	64	59
12.	Yogyakarta	3	3
	Total	416	390

Berdasarkan data diatas, jumlah peserta hadir keseluruhan yang mengikuti ujian pada periode Maret 2021 adalah berjumlah 390 orang. Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada pukul 08.30 s.d. 11.30 waktu setempat, sedangkan untuk wilayah Jakarta dilaksanakan dalam 2 shift yaitu pukul 08.30 s.d. 11.30 dan pukul 14.30 s.d. 17.30 WIB.

D. Hasil Ujian

Koreksi hasil ujian dan pengolahan hasil ujian dilaksanakan dari hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 diselenggarakan rapat kelulusan Tim Penguji Ahli Kepabeanaan. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa dari 390 orang peserta hadir ujian, 43 orang peserta dinyatakan lulus ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Maret Tahun Anggaran 2021 atau sebanyak 11,03% dari total peserta yang mengikuti ujian.

E. Sertifikat

Kelulusan Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-92/PP/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Maret Tahun Anggaran 2021. Atas peserta yang dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut telah diterbitkan sertifikat yang dapat diambil di Pusdiklat Bea dan Cukai pada jam dan hari kerja. (link pengumuman peserta lulus dan pengambilan sertifikat dapat diakses pada website pusdiklat bc atau pada link <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/pengumuman>)

F. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah untuk kegiatan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Anggaran Belanja per 19 Mei 2021 (sampai dengan selesai proses ujian periode Maret) sebesar Rp.188.802.420,- atau sebesar 27,77% dari rencana anggaran belanja sebesar Rp.679.932.000,-.

- b. Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dari pembayaran peserta ujian periode Maret adalah sebesar Rp.410.000.000,- atau sebesar 40% dari estimasi pendapatan sebesar Rp.1.025.000.000,- Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah 416 peserta yang sah dikarenakan terdapat pengembalian biaya ujian bagi peserta yang sakit atau melampirkan bukti swab positif corona.

G. Penutup

Secara umum Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan untuk periode Maret 2021 telah berjalan dengan lancar. Ditengah masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung, penyelenggaraan sudah dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kapasitas ruang ujian diisi dengan 25 s.d. 30% dari kapasitas ruangan, dilakukan penyemprotan dengan desinfektan, pengawas dan peserta selalu mengenakan masker, dan ruang ujian mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Demikian laporan yang bisa disampaikan terkait pelaksanaan ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan periode Maret Tahun 2021.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

LAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

PERIODE BULAN JULI 2021

A. Dasar Penyelenggaraan.

Pengumuman Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Tentang Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Bulan Juli 2021 Nomor Peng-224/PP.5/2021 tanggal 21 Mei 2021.

B. Tahap Registrasi dan verifikasi berkas.

Tahapan pertama dalam ujian sertifikasi ahli kepabeanan yaitu tahap pendaftaran dan verifikasi berkas. Pendaftaran sepenuhnya dilaksanakan secara online dengan mengunggah berkas dan persyaratan dari tanggal 24 Mei sampai dengan 9 Juni 2021. Dari dokumen pendaftaran yang masuk, dilakukan verifikasi berkas dengan data sebaran peserta sebagai berikut:

No.	Kota Lokasi Ujian	Peserta Mendaftar	Lulus Verifikasi Berkas
1.	Balikpapan	6	6
2.	Bandung	10	10
3.	Batam	25	25
4.	Jakarta	282	248
5.	Makassar	5	3
6.	Medan	17	13
7.	Palembang	6	6
8.	Semarang	31	25
9.	Surabaya	39	36
	Total	421	372

Dari peserta yang lulus verifikasi administrasi berkas, kemudian diwajibkan melakukan pembayaran PNBP berdasarkan tarif yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 sejumlah Rp,1.000.000,- Dari peserta yang lulus, sampai dengan batas waktu pembayaran biaya ujian, sebanyak 303 peserta telah melakukan pembayaran dan dinyatakan sah mengikuti ujian.

C. Penyelenggaraan Ujian

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Juli sebelumnya direncanakan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2021, tetapi karena penerapan PPKM Darurat, maka diundur menjadi tanggal 20 Agustus 2021 dengan lokasi dan sebaran peserta sebagai berikut:

No.	Kota Lokasi Ujian	Peserta Terdaftar	Peserta Hadir
1.	Bandung	9	9
2.	Balikpapan	6	6
3.	Batam	17	13
4.	Jakarta	202	164
5.	Makassar	3	2
6.	Medan	12	9
7.	Palembang	6	6
8.	Semarang	15	10
9.	Surabaya	33	26
	Total	303	245

Berdasarkan data diatas, jumlah peserta hadir keseluruhan yang mengikuti ujian pada periode Juli 2021 adalah berjumlah 245 orang. Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada pukul 08.30 s.d. 11.30 waktu setempat, sedangkan untuk wilayah Jakarta dilaksanakan dalam 2 shift yaitu pukul 08.30 s.d. 11.30 dan pukul 14.30 s.d. 17.30 WIB.

D. Hasil Ujian

Koreksi hasil ujian dan pengolahan hasil ujian dilaksanakan dari hari Senin tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 diselenggarakan rapat kelulusan Tim Penguji Ahli Kepabeanaan. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa dari 245 orang peserta hadir ujian, 13 orang peserta dinyatakan lulus ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Juli Tahun Anggaran 2021 atau sebanyak 5,31% dari total peserta yang mengikuti ujian.

E. Sertifikat

Kelulusan Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-144/PP/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Juli Tahun Anggaran 2021. Atas peserta yang dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut telah diterbitkan sertifikat yang dapat diambil di Pusdiklat Bea dan Cukai pada jam dan hari kerja. (link pengumuman peserta lulus dan pengambilan sertifikat dapat diakses pada website pusdiklat bc atau pada link <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/pengumuman>)

F. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah untuk kegiatan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Anggaran Belanja per 30 September 2021 (sampai dengan selesai proses ujian periode Juli) sebesar Rp.369.054.512,- atau sebesar 51,83% dari rencana anggaran belanja sebesar Rp.712.008.000,-.
- b. Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dari pembayaran peserta ujian sampai dengan 30 September adalah sebesar Rp.694.000.000,- atau sebesar 66,73% dari estimasi pendapatan sebesar Rp.1.025.000.000,.

G. Penutup

Secara umum Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan untuk periode Juli 2021 telah berjalan dengan lancar. Ditengah masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung, penyelenggaraan sudah dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kapasitas ruang ujian diisi dengan 25 s.d. 30% dari kapasitas ruangan, dilakukan penyemprotan dengan desinfektan, pengawas dan peserta selalu mengenakan masker, dan ruang ujian mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Demikian laporan yang bisa disampaikan terkait pelaksanaan ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan periode Juli Tahun 2021.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

LAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

PERIODE BULAN OKTOBER 2021

A. Dasar Penyelenggaraan.

Pengumuman Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Tentang Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Bulan Oktober 2021 Nomor Peng-419/PP.5/2021 tanggal 17 September 2021.

B. Tahap Registrasi dan verifikasi berkas.

Tahapan pertama dalam ujian sertifikasi ahli kepabeanan yaitu tahap pendaftaran dan verifikasi berkas. Pendaftaran sepenuhnya dilaksanakan secara online dengan mengunggah berkas dan persyaratan dari tanggal 20 September sampai dengan 1 Oktober 2021. Dari dokumen pendaftaran yang masuk, dilakukan verifikasi berkas dengan data sebaran peserta sebagai berikut:

No.	Kota Lokasi Ujian	Peserta Mendaftar	Lulus Verifikasi Berkas
1.	Balikpapan	6	6
2.	Bandung	6	6
3.	Batam	15	14
4.	Jakarta	243	234
5.	Makassar	1	1
6.	Medan	7	7
7.	Palembang	2	2
8.	Semarang	46	45
9.	Surabaya	62	59
10.	Yogyakarta	2	2
	Total	390	376

Dari peserta yang lulus verifikasi administrasi berkas, kemudian diwajibkan melakukan pembayaran PNBP berdasarkan tarif yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 sejumlah Rp,1.000.000,- Dari peserta yang lulus, sampai dengan batas waktu pembayaran biaya ujian, sebanyak 326 peserta telah melakukan pembayaran dan dinyatakan sah mengikuti ujian.

C. Penyelenggaraan Ujian

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober telah diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan lokasi dan sebaran peserta sebagai berikut:

No.	Kota Lokasi Ujian	Peserta Terdaftar	Peserta Hadir
1.	Bandung	4	4
2.	Balikpapan	5	5
3.	Batam	7	6
4.	Jakarta	200	196
5.	Makassar	1	1
6.	Medan	6	6
7.	Palembang	1	1
8.	Semarang	44	42
9.	Surabaya	56	55
10.	Yogyakarta	2	2
	Total	326	318

Berdasarkan data diatas, jumlah peserta hadir keseluruhan yang mengikuti ujian pada periode Oktober 2021 adalah berjumlah 318 orang. Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada pukul 08.30 s.d. 11.30 waktu setempat, sedangkan untuk wilayah Jakarta dilaksanakan dalam 2 shift yaitu pukul 08.30 s.d. 11.30 dan pukul 14.30 s.d. 17.30 WIB.

D. Hasil Ujian

Koreksi hasil ujian dan pengolahan hasil ujian dilaksanakan dari hari Senin tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 diselenggarakan rapat kelulusan Tim Penguji Ahli Kepabeanan. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa dari 318 orang peserta hadir ujian, 32 orang peserta dinyatakan lulus ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober Tahun Anggaran 2021 atau sebanyak 10,06% dari total peserta yang mengikuti ujian. Kelulusan Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan kemudian telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-183/PP/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober Tahun Anggaran 2021. Pengumuman peserta lulus dapat diakses pada website pusdiklat bc atau pada link <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/pengumuman>